

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD REZA

NIM 0502172311

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

MUHAMMAD REZA

NIM 0502172311

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Reza**
Nim : 0502172311
Tempat/tgl. Lahir : Stabat/11 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Aceh Gg. Aceh V Dsn. X Bandar Setia Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KOTA MEDAN**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Reza

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH) KOTA MEDAN**

Oleh :

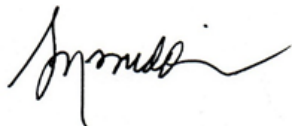
Muhammad Reza

Nim. 0502172311

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S, Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syaariah

Medan, 24 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Saparuddin SE., Ak., SAS., M. Ag

NIDN. 2018076301

Pembimbing 2



Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A

NIDN. 2003018501

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, M.A

NIDN. 2001077903

Skripsi berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN)**” an. Muhammad Reza, NIM 0502172311 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

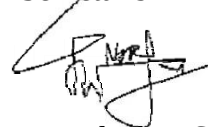
Medan, 02 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Hendra Harmain, SE, M. Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris



Aqwa Naser daulay, SE. I, M. Si
NIDN. 2024128801

Anggota



1. Dr. Saparuddin, SE.,Ak.,SAS., M.Ag
NIDN. 2018076301



2. Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A
NIDN. 2003018501



3. Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602



4. Nurul Inayah, ME
NIDN. 0103129201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Muhammad Reza (2021), “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan” dibawah bimbingan Dr. Saparuddin, SE. Ak, SAS, M.Ag sebagai Pembimbing Skripsi I dan Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota Medan dengan mengacu pada PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Hal ini berarti penerapan Laporan Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah *Subahanahu Wata'ala*, atas segala limpahan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Atas berkenaan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bukti perjuangan dan ikhtiar yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wassallam* “*Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad*”. Sang revolusioner sejati dan suri tauladan yang menjadi patron dalam setiap hembusan nafas penulis. Semoga kelak kita akan mendapat *syafa'at* nya di *yaumul akhir* kelak *Aamiin*.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KOTA MEDAN”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selesainya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa dan sangat spesial kepada dua insan yang sangat luar biasa, ialah kedua orang tua penulis, Abah Syahrial Efendi dan Mama Sulistiawati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a yang tak pernah henti dan tak pernah putus dalam setiap gerak langkah yang penulis lakukan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta selaku soteh penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis dari awal kuliah sampai sekarang.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Saparuddin SE, Ak, SAS, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang ditengah-tengah kesibukannya telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA selaku Pembimbing Skripsi II dan sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan arahan, nasehat, masukan, serta bimbingan selama kuliah dan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan terkhusus kepada Bapak Syahril Rangkuti, Ibu Maria dan Kak Nina di Bidang Anggaran serta Bapak Darman Silalahi di Bidang Akuntansi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Abang penulis yaitu Muhammad Rizki yang sangat banyak membantu penulis baik selama kuliah, selama berorganisasi dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Muhammad Hafzhan dan Muhammad Irfan yang sudah membersamai penulis dari masa PBAK, kuliah, organisasi, KKN, Magang, sampai akhir dari

penulisan skripsi ini. Dua orang yang dengan kehadirannya selalu memberikan dampak positif, walau serumit apapun urusan dan masalah saat itu pasti akan selesai dengan cepat dengan kehadiran mereka.

11. Kepada teman aliyah penulis yang bernama Rahmatul Iksan yang sudah banyak memberikan bantuan dengan meluangkan waktunya dan meminjamkan buku-bukunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan AKS'E Stambuk 2017 yang sudah bersama-sama penulis dalam menyelesaikan studi S1. Terkhusus kepada hafzhan, irfan, sri aulia, risvi, rizki isnani, hastia dan ira yona yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, motivasi, dan inspirasi kepada penulis selama kuliah maupun selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman magang penulis di BPKAD Kota Medan yaitu Ilham Kholid, Wahyul, Fadhil, Hafzhan dan Irfan yang sudah banyak memberikan inspirasi dan motivasi serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Kelompok 24 Desa Pardomuan 2020 yang terus memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FEBI UIN-SU yang telah memberikan proses yang luar biasa kepada penulis selama kuliah dan terus memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (HMJ-AKS) FEBI UIN-SU Periode 2018-2019 dan 2019-2020 yang telah memberikan banyak dorongan, semangat, bantuan, referensi, inspirasi dan motivasi selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada Abangda Muhammad Rizki, Rizky Mursidi, Paidi, dll.
17. Kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendo'akan dan membantu penulis selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap apa yang

dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Reza', written in a cursive style.

Muhammad Reza

NIM 0502172311

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis.....	8
1. Akuntansi Pemerintahan	8
a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	8
b. Tujuan Pemerintah dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	9
c. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan	11
2. Standar Akuntansi Pemerintah.....	11
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah.....	11

b. Tujuan dan Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintah	14
3. Laporan Keuangan Daerah.....	14
a. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah.....	15
b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah	18
c. Komponen-konponen Laporan Keuangan Pemerintah	20
d. Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah .	25
4. Laporan Realisasi Anggaran	29
a. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	29
b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran.....	34
c. Laporan Realisasi Anggaran Menurut Perspektif Syariah	35
B. Kajian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pemikiran.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
1. Tempat Penelitian.....	48
2. Waktu Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
1. Jenis Data	49
2. Sumber Data.....	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
1. Subjek Penelitian.....	51
2. Objek Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Wawancara	51
2. Studi Dokumentasi	52
F. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
--	----

B. Temuan Penelitian.....	64
1. Prosedur Penyusunan LRA Kota Medan	64
2. Penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.....	66
C. Pembahasan Penelitian.....	68
1. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	68
2. Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun BPKAD Kota Medan dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 tahun 2010.....	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	76
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	49
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian	55
Tabel 4.3 Daftar Checklist	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1 Logo Pemerintah Kota Medan	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : LRA Pemerintah Kota Medan Tahun 2020	80
Lampiran II : LRA Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai PSAP No. 02.....	82
Lampiran III : Daftar Wawancara	84
Lampiran IV : Dokumentasi wawancara.....	86
Lampiran V : Surat Keterangan Riset	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang bagus (Good Governance) ialah prinsip pokok untuk pemerintahan suatu negeri, salah satunya Indonesia. Perihal inilah yang mendesak pemerintah pusat serta pemerintah wilayah di Indonesia mempraktikkan transparansi serta akuntabilitas publik. Bagi mardiasmo, Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban orang yang bertindak sebagai pemegang sebuah amanah (agent) untuk menyerahkan pertanggungjawaban, menyajikan, memberi tahu, serta mengatakan seluruh kegiatan serta aktivitas yang jadi tanggungjawabnya kepada orang yang memberikan amanah (principal) yang mempunyai hak serta kewenangan buat meminta laporan pertanggungjawaban tersebut.¹

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan dan akuntabilitas maka diperlukan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu ketentuan atau aturan untuk melakukan penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di Indonesia untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas, SAP digunakan buat membagikan kelancaran untuk pemerintah pusat ataupun daerah ketika melakukan penataan laporan keuangan. SAP yang berlaku sekarang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 dan penyusunannya wajib mengikuti

¹Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009) h. 20

peraturan tersebut. Pelaksanaan SAP wajib dilaksanakan supaya terdapat kesamaan penyajian laporan keuangan di seluruh pemerintahan di Indonesia.²

Seperti yang sudah disebutkan, SAP termaktub di dalam PP Nomor. 71 Tahun 2010, satu diantara karakteristik dari perubahannya merupakan pemakaian basis akuntansi dalam penggunaannya, dari yang awalnya basis kas jadi basis akrual, yang mana basis kas melakukan pencatatan transaksi dikala terjadi penerimaan serta pengeluaran kas namun tidak menulis aset serta kewajiban, sebaliknya basis akrual menulis transaksi saat terbentuknya transaksi (baik kas ataupun non kas) serta menulis aset serta kewajiban.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Dengan adanya basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintah, perubahan kekayaan pemerintah, sumber – sumber penerimaan alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 tahun 2010 menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 2 substansi dalam pemanfaatan pembukuan dalam pemerintahan, yaitu unsur pembukuan khusus dan unsur pengumuman. Substansi pembukuan adalah suatu unit di dalam badan publik yang mengelola anggaran belanja, seperti halnya komitmen untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan pembukuan yang dilakukannya. Unsur perincian adalah satuan administrasi yang terdiri dari

²Yoyo Sudaryo, *et. al.*, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h.34

sekurang-kurangnya satu unsur pembukuan yang dalam peraturan perundang-undangan harus mencantumkan laporan pertanggungjawaban, sebagai laporan keuangan yang bermanfaat secara luas.³

Dengan terbitnya PP Nomor. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang hendak digunakan buat mengantarkan laporan keuangan yang solid serta bisa dijadikan alibi buat mengambil keputusan yang diandalkan buat jadi acuan serta standar buat diterapkan di lingkup pemerintahan, khususnya pemerintah pusat, pemerintah wilayah, serta unit-unit hierarki di dalam pemerintah pusat/ wilayah yang berkewajiban menerbitkan laporan keuangan buat tingkatkan tanggung jawab serta kelancaran administrasi keuangan otoritas publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 menimpa Standar Akuntansi Pemerintahan ada Statment Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 yang mengendalikan tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan tadinya dengan realisasi yang terjalin dalam perihal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga bisa dicoba penilaian atas kinerja yang dicapai dalam sesuatu wilayah tersebut. Standar ini dijadikan selaku dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Wilayah. Sehingga, akuntabilitas laporan tersebut bisa diandalkan sebagaimana diresmikan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan pedoman ini, pada dasarnya, otoritas publik memerlukan keterusterangan serta tanggung jawab dalam menyajikan laporan realisasi anggarannya. Sementara itu sehabis lahirnya undang-undang ini, masih banyak SKPD yang belum memperoleh Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Sedangkan

³*Ibid.*

pemeriksaan BPK atas 541 LKPD pada tahun 2020 belum dipublikasikan melalui website resmi BPK RI.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Bebasis Akreal (SAIBA) dan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.

Namun, setelah terbitnya Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka alat kerja yang digunakan seluruh OPD di Indonesia termasuk BPKAD Kota Medan sudah tidak lagi menggunakan SIMDA, tetapi menggunakan SIPD (Sistem informasi pemerintahan daerah). Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem ini wajib diterapkan di seluruh instansi pemerintahan daerah di Indonesia.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan di daerah. Sistem ini diharapkan dapat meiningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD juga berfungsi sebagai sistem untuk mengumpulkan data secara cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi, yang digunakan sebagai perencanaan program dan evaluasi daerah secara efisien, rasional, dan efektif. Di BPKAD Kota Medan sendiri sistem ini

mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi moneter daerah dalam lingkup akuntansi, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan.

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah melakukan proyeksi dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di BPKAD Kota Medan. Tentunya dalam menjalankan program ini tidaklah mudah, harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah, pertanyaan pro kontra mengenai kelayakan SIPD untuk mengganti peran SIMDA terus menerus timbul. Berdasarkan survey awal, penulis menemukan beberapa masalah, yang paling baru muncul adalah terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah dan sistem yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syahrial Rangkuti selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Medan, penggantian sistem sebagai alat kerja yang terlampau cepat serta dibarengi dengan sistem yang belum sempurna menyebabkan banyak SKPD kewalahan serta banyak pekerjaan yang tertunda. Pada tahun sebelumnya BPKAD Kota Medan masih memakai SIMDA dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya, namun dikarenakan peralihan sistem maka seluruh Pemerintah daerah dan OPD wajib menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Namun, karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada BPKAD Kota Medan seperti pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Ditambah lagi efek pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak maret 2020 juga menimbulkan banyak masalah baru yang mengharuskan setiap orang harus mengurangi interaksi

langsung dengan orang lain dan menyebabkan hampir seluruh pekerjaan dilakukan dari rumah atau *work from home*.

Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran selaku salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini, penulis mau memperhitungkan serta mempelajari gimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan. Apakah sudah cocok ataupun belum cocok dengan PSAP No 02 PP No 71 Tahun 2010. Sebab bila laporan Realisasi yang disajikan tersebut belum cocok dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 02, maka akan menyebabkan kesalahan dalam perihal pengambilan keputusan untuk pihak pengguna terkhusus Pemerintah Kota Medan.

Dengan penjelasan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dan penyajian serta penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang disusun Badan Pengelola Keuangan serta Peninggalan wilayah Kota Medan bersumber pada PSAP No 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 serta mengangkat judul riset :**“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).”**

B. Rumusan Masalah

Dari landasan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan?
2. Apakah penerapan LRA yang disusun oleh BPKAD Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Dari landasan permasalahan dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan penyajian LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan LRA yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan PSAP Nomor 02 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Medan.

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Sebagai informasi dan bahan masukan untuk mengulas kembali tentang PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lainnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan pembanding dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut.¹

Dalam era globalisasi dan tuntutan perubahan yang semakin luas, tugas pembukuan sebagai alat perekam semakin dibutuhkan. Kepentingan ini tidak hanya diharapkan untuk administrasi suatu zat, tetapi juga untuk kebutuhan tanggung jawab terhadap banyak perkumpulan yang membutuhkannya. Dalam dunia bisnis (Komersial), pembukuan telah tercipta seiring dengan kemajuan bisnis. Hal ini membuat pembukuan memiliki pilihan untuk berubah dan berkreasi seiring dengan kemajuan dunia usaha. Pembukuan pemerintah merupakan bidang pembukuan yang saat ini sedang berkembang pesat.

Peningkatan pembukuan pemerintah tidak secepat pembukuan bisnis. Penjelasan, atributnya tidak banyak berubah. Dengan adanya permintaan masyarakat, pembukuan pemerintah menjadi signifikan. Semakin besar aset yang diawasi oleh otoritas publik, semakin menonjol permintaan tanggung jawab moneter sebagai jenis keterusterangan moneter dalam pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan dapat dicirikan sebagai gerakan menawarkan jenis bantuan untuk memberikan data moneter pemerintah tergantung pada cara yang paling umum dari pencatatan, pemesanan,

¹Nantono dan Namira Ufrida Rahmi, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 2

penjumlahan, pertukaran moneter administrasi dan terjemahan data moneter.²

Akibatnya, sebagai aturan, perjanjian ini sama dengan pembukuan, perbedaannya terletak pada jenis pertukaran yang dicatat dan kliennya. Jenis yang dicatat dalam pembukuan pemerintah adalah pertukaran moneter pemerintah. Klien secara keseluruhan adalah individu di mana saja yang ditangani oleh organisasi administratif, pemerintah, dan bos pinjaman, misalnya, IMF, ADB, dan lainnya.

Kebutuhan akan pembukuan pemerintah semakin besar sehingga disiplin pembukuan memasukkan pembukuan pemerintah sebagai cirinya. Dengan diakuinya pembukuan pemerintah dalam disiplin pembukuan, pembukuan menjadi lebih berfluktuasi.

Setiap kali dipesan, luasan pembukuan dipisahkan menjadi dua, yaitu pembukuan mini dan pembukuan skala besar. Pembukuan pemerintah dan pembukuan bisnis dikenang sebagai pembukuan mini, sedangkan pembukuan sosial dan pembukuan umum dikenang untuk pembukuan skala besar.

b. Tujuan Pemerintah dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Pemerintah

Sebagai jenis asosiasi area publik, ia memiliki tujuan keseluruhan untuk mengembangkan individu. Untuk memahami hal ini, individu membuat pedoman umum yang harus dipenuhi oleh otoritas publik sebagai konstitusi atau konstitusi dan undang-undang dan pedoman yang berbeda. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan pembukuan pemerintah dengan pembukuan bisnis sejauh tujuan dan perkiraan pelaksanaannya. Meskipun tujuan kedua asosiasi tersebut unik, pada umumnya alasan pembukuan pemerintah dan pembukuan bisnis adalah untuk memberikan data moneter tentang pertukaran moneter yang dilakukan oleh asosiasi tersebut dalam periode tertentu. Dengan demikian,

²Nur Amalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bogor: In Media, 2017), h. 1

pembukuan pemerintah dan pembukuan bisnis secara eksplisit memiliki sasaran sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Kapasitas tanggung jawab lebih luas daripada hanya konsistensi dengan undang-undang dan pedoman yang sesuai, namun juga berfokus pada pemanfaatan aset secara hati-hati, produktif, sukses dan moneter. Alasan mendasar untuk tanggung jawab ditekankan kepada setiap direktur atau eksekutif yang dapat meneruskan tanggung jawab keuangan dengan menyerahkan laporan keuangan.

2) Manajerial

Pembukuan pemerintah memungkinkan otoritas publik untuk melakukan kapasitas administrasi dengan mengatur melalui pengaturan APBN dan metodologi perbaikan lainnya..

3) Pengawasan

Pembukuan pemerintah dibuat untuk mempertimbangkan pengawasan yang lebih sederhana terhadap penatausahaan dana negara oleh pejabat pemeriksa, misalnya BPK- RI.³

Kualitas pembukuan pemerintah unik dalam kaitannya dengan pembukuan bisnis, perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pembukuan pemerintah tidak ada laporan manfaat
- 2) Otoritas publik mencatat pengeluaran ketika rencana keuangan dicatat
- 3) Pembukuan pemerintah dapat memanfaatkan lebih dari satu jenis aset
- 4) Pembukuan pemerintah akan mencatat penggunaan modal dalam laporan aset yang dinilai dan hasil kerja.
- 5) Pembukuan pemerintah tidak fleksibel karena sangat bergantung pada undang-undang dan pedoman.
- 6) Dalam pembukuan pemerintah belum ada ukuran modal dan laba ditahan yang belum ditentukan lembarnya. Meskipun terdapat

³*Ibid*, h. 2

perbedaan, pembukuan pemerintah sebenarnya memiliki kemiripan dengan pembukuan bisnis, khususnya:

- a) Memberikan data tentang posisi moneter dan konsekuensi tugas.
- b) Ikuti pedoman dan norma akuntansi yang baik
- c) Bersama-sama membina standar dan norma pembukuan.
- d) Menggunakan kerangka grafik estimasi standar.⁴

c. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah

Kemajuan pembukuan pemerintah tidak secepat pembukuan bisnis. Penjelasan, atributnya tidak banyak berubah. Dengan adanya permintaan masyarakat, pembukuan pemerintah menjadi signifikan. Semakin besar aset yang diawasi oleh otoritas publik, semakin menonjol permintaan tanggung jawab moneter sebagai jenis keterusterangan moneter dalam pemerintahan. Otoritas publik sebagai jenis asosiasi area publik memiliki tujuan keseluruhan untuk bantuan pemerintah individu. Untuk memahami hal ini, individu membuat pedoman umum yang harus dipenuhi oleh otoritas publik sebagai konstitusi atau konstitusi dan undang-undang dan pedoman yang berbeda. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan pembukuan pemerintah dengan pembukuan bisnis dalam hal tujuan dan perkiraan pelaksanaannya. Meskipun sasaran kedua asosiasi tersebut unik, pada dasarnya alasan pembukuan pemerintah dan pembukuan bisnis adalah untuk memberikan data moneter pertukaran moneter yang dilakukan oleh asosiasi tersebut dalam periode tertentu.⁵

2. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Sesuai Undang-Undang No. 71 Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 Akuntansi adalah metode yang terlibat dengan membedakan, mencatat, memperkirakan,

⁴*Ibid*, h. 3

⁵*Ibid*.

mengkarakterisasi, menjumlahkan pertukaran dan peristiwa moneter, memperkenalkan laporan, dan menguraikan hasil. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah standar pembukuan yang diterapkan dalam perencanaan dan pengenalan laporan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah sekitarnya. Artikulasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal kuasa.⁶

Sementara itu, menurut Mardiasmo, norma pembukuan pemerintah adalah aturan atau aturan yang mengatur perlakuan pembukuan dalam kesiapan ringkasan fiskal untuk tujuan mengumumkan kepada klien laporan anggaran, sedangkan metodologi pembukuan adalah praktik luar biasa yang digunakan untuk menjalankan prinsip. Pedoman pembukuan diharapkan dapat menjamin konsistensi dalam pengungkapan moneter, kekurangan norma pembukuan pemerintah yang memuaskan akan memiliki konsekuensi negatif dengan ketergantungan dan objektivitas rendah dari data yang diperkenalkan, penyimpangan dalam perincian moneter dan kesulitan dalam mengevaluasi.⁷

Norma pembukuan pemerintah di Indonesia diberikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP dibentuk dengan tujuan untuk membangun keterusterangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembukuan pemerintah melalui perencanaan dan penyempurnaan norma-norma pembukuan pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. KSAP terdiri dari Panitia Permusyawaratan Standar Akuntansi Pemerintah (Panitia Permusyawaratan) dan Panitia Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan.⁸

Panitia Permusyawaratan bertanggung jawab untuk mengadakan rapat-rapat serta pendapat-pendapat dalam rangka merinci gagasan

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), h. 2

⁷Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 148

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran III Proses Penyusunan, h.2

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Panitia Kerja disertai tugas merencanakan, membentuk, dan menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah. Selain merencanakan SAP, KSAP bertanggung jawab untuk mempersiapkan, memeriksa, mengarahkan eksplorasi terbatas dan mendistribusikan berbagai distribusi yang diidentifikasi dengan prinsip, termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis adalah aturan dan data yang diberikan oleh KSAP untuk bekerja dengan pengaturan dan penggunaan SAP, hanya untuk mengatasi masalah pembukuan dan pengungkapan moneter.⁹

Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, ada 2 hasil pemberlakuan yang diidentikkan dengan norma pembukuan pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Pemerintah. Standar Akuntansi (SAP). PP No 71 ialah pengganti dari pedoman pembukuan pemerintah yang lama. PP Nomor 24 2005 memakai pendekatan basis kas mengarah akrual, sebaliknya PP Nomor 71 tahun 2010 memakai basis pendekatan akrual (full akrual).¹⁰ Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Sesuai PP 71 tahun 2010 :

- 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- 2) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 3) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- 4) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- 5) PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- 6) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- 7) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

⁹*Ibid*, h. 3

¹⁰Eka Nurmala Sari, et.al, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 49

- 8) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- 9) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- 10) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- 11) PSAP 10 tentang Koreksi, Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- 12) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
- 13) PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

b. Tujuan dan Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintah

Alasan dibuatnya pedoman pembukuan pemerintah adalah untuk mengisi sebagai pembantu dalam perencanaan laporan moneter sehubungan dengan tanggung jawab pelaksanaan APBN/APBD untuk lebih mengembangkan tanggung jawab dan kualitas penyelenggaraan moneter pemerintah yang tidak tergoyahkan.¹¹

Standar Akuntansi Pemerintahan diresmikan dengan undang-undang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indra Bastian mengatakan situasi Standar Akuntansi Pemerintahan telah cocok dengan UU Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diresmikan dengan Peraturan Pemerintah serta tiap faktor rinci pemerintah pusat serta pemerintah sekitarnya dibutuhkan buat mempraktikkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).¹²

3. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi dari metode yang digunakan untuk mengenali, memperkirakan, mencatat pertukaran keuangan (moneter) dari bahan pembukuan di lingkungan pemerintah yang digunakan sebagai data tentang tanggung jawab administrasi

¹¹Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)", *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2020, Vol. 23, No. 3, h. 249

¹²*Ibid.*

keuangan unsur pembukuan dan dinamika keuangan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.¹³

a. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah disusun buat sediakan data yang relevan menimpa posisi keuangan serta segala transaksi yang dicoba oleh sesuatu entitas pelaporan wilayah sepanjang satu periode pelaporan. Laporan keuangan paling utama digunakan buat mengenali nilai sumber energi ekonomi yang dimanfaatkan buat melakukan aktivitas operasional pemerintahan, memperhitungkan keadaan keuangan, mengevaluasi daya guna serta efisiensi sesuatu entitas pelaporan, serta menolong memastikan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual melaporkan kalau tiap entitas pelaporan memiliki kewajiban buat memberi tahu upaya-upaya yang sudah dicoba dan hasil yang dicapai dalam penerapan aktivitas secara sistematis serta terstruktur pada sesuatu periode pelaporan buat kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber energi dan penerapan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan secara periodik.

2) Manajemen

Menolong para pengguna buat mengevaluasi penerapan aktivitas sesuatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga mempermudah guna perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas segala peninggalan, kewajiban, serta ekuitas pemerintah buat kepentingan warga.

3) Transparansi

Membagikan data keuangan yang terbuka serta jujur kepada warga bersumber pada pertimbangan kalau warga mempunyai hak buat

¹³Erlina dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2015), h. 19

mengenalinya secara terbuka serta merata atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber energi yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Menolong para pengguna dalam mengenali kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan buat membiayai segala pengeluaran yang dialokasikan serta apakah generasi yang hendak tiba diasumsikan hendak turut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, paling utama dalam pemakaian sumber energi ekonomi yang dikelola pemerintah buat menggapai kinerja yang sudah direncanakan.¹⁴

Bagi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pelaporan keuangan pemerintah sepatutnya sediakan informasi yang berguna untuk para pengguna dalam memperhitungkan akuntabilitas serta membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, ataupun politik dengan:

- 1) Menyajikan data tentang sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
- 2) Menyajikan data menimpa kecukupan penerimaan periode berjalan buat membiayai segala pengeluaran
- 3) Menyajikan data menimpa jumlah sumber energi ekonomi yang digunakan dalam aktivitas entitas pelaporan dan hasil- hasil yang sudah dicapai
- 4) Menyajikan data menimpa gimana entitas pelaporan mendanai segala kegiatannya serta memadai kebutuhan kasnya
- 5) Menyajikan data menimpa posisi keuangan serta keadaan entitas pelaporan berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 01 Kerangka konseptual, h.7

jangka pendek ataupun jangka panjang, tercantum yang berasal dari pungutan pajak serta pinjaman

- 6) Menyajikan data menimpa pergantian posisi keuangan entitas pelaporan, apakah hadapi peningkatan ataupun penyusutan, selaku akibat aktivitas yang dicoba sepanjang periode pelaporan¹⁵

Buat penuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan sediakan data mengenai sumber serta pemakaian sumber energi keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang penerapan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), peninggalan, kewajiban, ekuitas, serta arus kas sesuatu entitas pelaporan.¹⁶

Di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara eksplisit, motivasi di balik perincian moneter pemerintah adalah untuk memberikan data yang bernilai dinamis dan untuk menunjukkan tanggung jawab mengumumkan substansi atas aset yang bergantung padanya, dengan:

- 1) Menyediakan data tentang situasi aset keuangan, kewajiban, dan nilai pemerintah
- 2) Menyediakan data tentang sumber, porsi dan pemanfaatan aset keuangan, kewajiban, dan nilai pemerintah
- 3) Menyediakan data tentang sumber, porsi, dan pemanfaatan aset keuangan
- 4) Memberikan data tentang kesesuaian dengan pengakuan rencana pengeluaran;
- 5) Memberikan data tentang bagaimana elemen perincian mendanai latihannya dan memenuhi kebutuhan uangnya
- 6) Menyediakan data tentang kemampuan badan publik untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah
- 7) Sediakan data yang berguna untuk menilai kemampuan zat yang merinci untuk mendukung latihannya.¹⁷

¹⁵*Ibid*, h. 8

¹⁶*Ibid*, Lampiran I, 02 PSAP 01, h. 7

¹⁷*Ibid*, Lampiran II, 02 PSAP 01, h. 6

b. Ciri Pokok Kualitatif Laporan Keuangan Daerah

Sesuai Konsep Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa sifat-sifat ikhtisar fiskal adalah mengatur perkiraan-perkiraan yang harus dicantumkan dalam data pembukuan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat kebutuhan tersebut merupakan hal-hal penting yang mengatur yang diperlukan dengan tujuan agar otoritas publik dapat memenuhi karakteristik yang diperlukan, secara spesifik:

1) Relevan

Ringkasan fiskal dapat menjadi penting jika data yang dikandungnya berdampak pada pilihan klien dengan membantu mereka menggambarkan kejadian masa lalu atau sekarang, dan meramalkan masa depan, sama seperti menegaskan atau memperbaiki konsekuensi dari penilaian masa lalu. Selanjutnya data laporan fiskal yang bersangkutan dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Data dianggap penting jika memiliki tulisan:

- a) Memiliki keunggulan masukan (kritik harga diri). Data yang memberdayakan klien untuk mengubah atau mengatasi asumsi mereka sebelumnya.
- b) Memiliki keunggulan prescient (prescient worth). Data dapat membantu klien mengantisipasi masa depan tergantung pada hasil sebelumnya dan perkembangan terakhir.
- c) Sesuai jadwal. Data diperkenalkan dengan cara yang ideal sehingga sangat menarik dan berharga secara dinamis.
- d) Lengkap. Data pembukuan moneter diperkenalkan selengkap yang diharapkan, yang menggabungkan semua data pembukuan yang dapat berdampak dinamis. Data dasar untuk hal-hal data primer yang terdapat dalam rangkuman anggaran sudah jelas sehingga dapat ditemukan pemanfaatan data tersebut.

2) Andal

Data dalam laporan anggaran dibebaskan dari pemahaman yang salah arah dan materi yang tidak benar, menyajikan setiap realitas secara nyata, dan dapat memperjelas. Data mungkin penting, tetapi dengan asumsi kecenderungan atau tampilannya tidak dapat dipercaya, penggunaan data dapat dianggap menipu. Atribut data dan kualitas:

- a) Pertunjukan yang adil. Data yang selalu menggambarkan pertukaran dan peristiwa lain yang dimaksudkan untuk ditangani atau yang dapat diantisipasi untuk diperkenalkan.
- b) Dapat didemonstrasikan (kejelasan). Data yang dimasukkan dalam ringkasan fiskal dapat dicoba, dan jika pengujian diselesaikan lebih dari satu kali dengan berbagai pertemuan, hasilnya sebenarnya menunjukkan berbagai tujuan.
- c) Nonpartisan. Data ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak sesuai dengan persyaratan pertemuan tertentu.

3) Sebanding

Data yang terkandung dalam ringkasan anggaran akan lebih membantu jika sangat kontras dan laporan anggaran periode lalu atau laporan pengumuman secara keseluruhan. Pemeriksaan dapat dilakukan di dalam dan dari jarak jauh. Pemeriksaan internal dapat dilakukan ketika suatu elemen menerapkan strategi pembukuan yang sama dari satu tahun ke tahun lainnya. Pemeriksaan luar dapat dilakukan jika bahan yang diperiksa menerapkan pendekatan pembukuan yang serupa. unsur pemerintah akan menerapkan pendekatan pembukuan yang lebih unggul dari strategi pembukuan saat ini, jika ada perubahan.

4) Dapat dijangkau

Data yang diperkenalkan dalam ringkasan anggaran terbuka untuk klien dan dikomunikasikan dalam struktur dan istilah yang disesuaikan dengan jangkauan pemahaman klien terjauh. Oleh karena itu, klien

memiliki informasi yang cukup tentang latihan dan iklim kerja elemen pengungkapan, seperti halnya kemampuan klien untuk memperoleh kemahiran dengan data yang dirujuk.

c. Komponen Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Untuk dapat memahami laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami komponen ringkasan anggaran. Persepsi harus dibuat pada setiap komponen yang terungkap, mengingat penelitian untuk nilai komponen yang diselesaikan, realitas nilai dan dampaknya terhadap eksekusi moneter.

Ringkasan fiskal dasar terdiri dari laporan pengakuan pengeluaran, mencakup perubahan penyesuaian pengeluaran yang berlebihan, catatan moneter, laporan fungsional, laporan pendapatan, laporan tentang perubahan nilai, dan catatan untuk laporan fiskal.¹⁸

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan jenis pendapatan, porsinya, dan menggambarkan pemeriksaan antara rencana keuangan dan distribusinya..¹⁹

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukuan Pemerintah, LRA menyajikan gambaran tentang sumber, porsi, dan penggunaan aset moneter yang diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sekitarnya, yang menunjukkan adanya pemeriksaan antara rencana keuangan dan rencana keuangannya. pengakuan dalam satu periode perincian. Dalam laporan pengakuan belanja komponen yang secara langsung dicakup terdiri dari pendapatan, penggunaan, pemindahan, dan pembiayaan LRA sebagai berikut:

a) Pendapatan LRA

¹⁸Moermahadi S. Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik, dan Permasalahan*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), h. 2

¹⁹Tulis S. Meliala, *et.al*, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Semesta Media, 2014), h. 25

Pendapatan LRA adalah pendapatan Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh zat pemerintah lainnya yang menambah limpahan saldo pengeluaran pada waktu tahun anggaran yang bersangkutan yang merupakan hak badan umum, dan tidak boleh diganti oleh otoritas publik.

b) Belanja

Penggunaan tersebut secara keseluruhan adalah konsumsi oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi kelebihan saldo pengeluaran pada waktu tahun anggaran yang berlaku yang tidak akan diganti oleh badan publik.

c) Transfer

Pemindahan adalah penerimaan atau pembayaran uang tunai oleh unsur pengungkap dari/ke bahan pengumuman lain, termasuk harta kekayaan penyesuaian dan harta bagi hasil.

d) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap pembayaran/penggunaan yang tidak mempengaruhi jumlah kekayaan dari zat yang harus diganti atau berpotensi akan diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun moneter yang menyertainya, yang dalam perencanaan pemerintah pada dasarnya diharapkan dapat menutupi kekurangan atau memanfaatkan kelebihan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat muncul dari uang muka dan hasil spekulasi. Konsumsi pembiayaan tersebut antara lain digunakan untuk penggantian direksi kredit, pinjaman kepada unsur lain, dan bunga nilai oleh otoritas publik.²⁰

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Perubahan Neraca Anggaran lebih banyak memberikan data tentang

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 01 Kerangka konseptual, h.16

peningkatan atau penurunan neraca belanja untuk tahun pengungkapan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²¹

Saldo pengeluaran berlebih (SAL) adalah berbagai keseimbangan yang diperoleh dari pengumpulan SiLPA/SiKPA pada tahun-tahun moneter yang lalu dan sekarang dan perubahan yang diizinkan. Laporan tentang perubahan penyesuaian pengeluaran disiapkan dengan mengungkapkan elemen. Laporan perubahan neraca pengeluaran menyajikan komponen-komponen berikut:²²

- a) Saldo anggaran menjelang awal periode
- b) Penggunaan saldo pengeluaran yang meluap-luap
- c) Kelebihan lebih/kurang pembiayaan belanja tahun berjalan
- d) Koreksi kesalahan tahun pembukuan yang lalu
- e) Keseimbangan rencana keuangan selama akhir periode.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan sesuatu entitas pelaporan sehubungan dengan sumber energi, kewajiban, serta nilai pada bertepatan pada tertentu. Komponen yang dicakup oleh laporan akuntansi terdiri dari sumber energi, kewajiban, serta nilai. Tiap komponen bisa diklarifikasi selaku berikut:²³

- a) Aset merupakan peninggalan moneter yang dikendalikan serta dipunyai bonus oleh otoritas publik sebab peristiwa tadinya serta dari mana keuntungan moneter serta persahabatan di masa depan diandalkan buat diperoleh, baik oleh otoritas publik serta wilayah setempat, serta bisa diperkirakan dalam unit duit tunai, tercantum peninggalan nonmoneter yang berarti buat pengaturan administrasi buat totalitas populasi serta peninggalan yang ditaruh buat alibi otentik serta sosial.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid*, Lampiran I, 05 PSAP 04, h. 11

²³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 01 Kerangka konseptual, h.17

- b) Liabilitas merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa tadinya, penyelesaiannya menciptakan pencurahan peninggalan keuangan pemerintah
- c) ekuitas merupakan total peninggalan otoritas publik yang jadi pembeda antara Sumber daya dan kewajiban pemerintah.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional membagikan garis besar peninggalan moneter yang nilai perluasan serta penggunaannya yang diawasi oleh pemerintah pusat serta sekitarnya buat penerapan organisasi pemerintah dalam satu periode pengungkapan. Komponen- komponen yang secara langsung terselubung dalam laporan fungsional terdiri dari:²⁴

- a) Pendapatan dari Laporan Operasional merupakan hak otoritas publik yang dikira selaku kenaikan nilai dalam waktu tahun moneter yang bersangkutan serta tidak boleh ditukar.
- b) Pengeluaran merupakan komitmen pemerintah yang dialami selaku penyusutan total peninggalan.
- c) Transfer merupakan komitmen pemerintah yang dialami selaku penyusutan total peninggalan.
- d) Hal-hal luar biasa merupakan pembayaran yang luar biasa ataupun bayaran yang tidak biasa yang terjalin sebab kejadian ataupun pertukaran yang bukan ialah aktivitas universal, tidak bisa diandalkan buat terjalin dalam waktu yang lama ataupun teratur, serta terletak di luar keahlian pengendalian ataupun akibat dari zat yang bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan data kas yang diidentifikasi dengan pekerjaan, kontribusi, pembiayaan, dan latihan sesaat yang

²⁴*Ibid*, h. 16

menggambarkan keseimbangan awal, penerimaan, pembayaran, dan penyesuaian kas akhir dari pemerintah pusat/teritorial selama periode tertentu.²⁵

Komponen-komponen yang diingat dari Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pembayaran uang, yang masing-masing dapat diperjelas di bawah ini:²⁶

- a) Penerimaan kas adalah semua pendapatan yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pembayaran tunai adalah semua pendapatan yang timbul dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memberikan data tentang kenaikan atau pengurangan nilai untuk tahun perincian yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²⁷

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK merupakan data tambahan yang tidak dimasukkan dalam ringkasan fiskal tetapi perlu diperkenalkan dengan baik, seperti kewajiban dan tanggung jawab yang tidak terduga.²⁸

CALK memuat klarifikasi cerita dari angka-angka yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan ikhtisar fiskal juga memasukkan data tentang pengaturan pembukuan yang digunakan oleh bahan pengungkapan dan data lain yang diperlukan dan ditentukan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta artikulasi yang diharapkan untuk memberikan tampilan yang wajar dari laporan anggaran. Catatan atas laporan fiskal mengungkapkan, menyajikan, memberikan yang menyertainya:

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid*, h.19

²⁷*Ibid.*

²⁸Nurlaila, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung: Citapusaka Media, 2014), h. 32

- a) Pengungkapan Informasi Umum Entitas Pelapor dan Entitas Akuntansi
- b) Menyediakan data strategi moneter/moneter dan makroekonomi
- c) Menyajikan gambaran pencapaian fokus moneter selama tahun pembukaan beserta hambatan dan hambatan yang terlihat dalam mencapai tujuan
- d) Memberikan data tentang alasan perencanaan laporan fiskal dan pengaturan pembukuan yang dipilih untuk diterapkan pada bursa dan acara penting lainnya.
- e) Menyajikan seluk-beluk dan klarifikasi dari setiap hal yang diperkenalkan pada lembar muka ringkasan anggaran
- f) Mengungkapkan data yang dibutuhkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum diperkenalkan di lembar muka ringkasan anggaran
- g) Berikan data lain yang diperlukan untuk pertunjukan yang wajar, yang tidak dicantumkan di lembar muka ringkasan anggaran²⁹

d. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Standar pembukuan dan pengungkapan moneter direncanakan sebagai pengaturan yang dianggap dan cenderung oleh pembuat standar dalam mempersiapkan prinsip-prinsip, administrator pembukuan dan pengumuman moneter dalam melakukan latihan mereka, seperti halnya klien ringkasan fiskal dalam memahami laporan anggaran yang diperkenalkan. Berikutnya adalah delapan standar yang digunakan dalam pembukuan dan perincian moneter pemerintah:

1) Basis Akuntansi

Premis pembukuan yang digunakan dalam ringkasan fiskal otoritas publik adalah premis pengumpulan, untuk pengakuan gaji kerja, biaya, sumber daya, kewajiban, dan laporan nilai. Jika undang-undang dan

²⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 01 Kerangka konseptual, h. 19-20

pedoman mengharuskan pengenalan ringkasan fiskal pada premis uang, elemen tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan tersebut.

Alasan akumulasi Laporan Operasional menyiratkan bahwa pendapatan dirasakan ketika opsi untuk memperoleh pembayaran telah dipenuhi meskipun uang belum masuk ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh elemen pengumuman dan biaya dirasakan ketika komitmen itu hasil pengurangan total aset telah terpenuhi meskipun fakta bahwa uang belum dibagikan. dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau zat pengumuman. Pendapatan, misalnya, bantuan dari pertemuan luar/tidak dikenal karena administrasi juga dimasukkan dalam laporan fungsional.

Jika rencana pembelanjaan siap dan dilaksanakan pada premis uang, LRA siap pada premis uang, menyiratkan bahwa pembayaran dan penerimaan pembiayaan dirasakan pada saat uang masuk ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau dengan substansi pengumuman, dan konsumsi. , perpindahan dan penggunaan pembiayaan dirasakan ketika uang diperoleh. dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Bagaimanapun, jika rencana keuangan sudah siap dan dilakukan pada premis pengumpulan, LRA siap pada premis akumulasi.

Alasan akumulasi untuk laporan akuntansi menyiratkan bahwa sumber daya, kewajiban, dan nilai dirasakan dan dicatat ketika pertukaran terjadi, atau ketika peristiwa atau kondisi alam mempengaruhi dana pemerintah, tidak terlalu memperhatikan ketika uang atau rekanan uang diperoleh atau dibayarkan.

2) Nilai Historis (Biaya Historis)

Sumber daya disampaikan dalam ukuran uang dan uang yang dibayarkan rekan atau pada nilai yang wajar dari pemikiran untuk mendapatkan sumber daya pada saat memperoleh. Liabilitas dicatat dalam ukuran uang dan rekanan uang yang diandalkan untuk dibayar untuk memenuhi komitmen masa depan dalam pelaksanaan tugas

pemerintah. Kualitas yang direkam lebih solid daripada penilaian yang berbeda karena lebih adil dan jelas. Tanpa nilai otentik, nilai wajar dari sumber daya atau risiko yang terhubung dapat dimanfaatkan.

3) Realisasi

Bagi badan publik, pendapatan premis uang yang dapat diakses yang telah disetujui melalui rencana keuangan otoritas publik untuk suatu periode pembukuan akan digunakan untuk membayar kewajiban dan penggunaan pada periode tersebut. Mempertimbangkan bahwa LRA masih merupakan laporan yang diperlukan, pembayaran atau penggunaan berbasis tunai dirasakan setelah disetujui melalui rencana pengeluaran dan telah menambah atau mengurangi uang.

Aturan koordinasi pengeluaran terhadap pedoman pendapatan dalam pembukuan pemerintah tidak mendapatkan penekanan seperti yang dipoles dalam pembukuan bisnis.

4) Substansi Di Atas Bentuk

Informasi diharapkan betul- betul menghadirkan pertukaran serta kejadian lain yang wajib diperkenalkan, sehingga pertukaran ataupun kejadian lain tersebut wajib dicatat serta diperkenalkan cocok dengan substansi serta kenyataan moneterinya, serta bukan cuma kesepakatan mereka. Bila substansi sesuatu pertukaran ataupun kejadian lain berlawanan/ tidak sama dengan sudut pandang kesepakatan, hingga perihal itu wajib diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Periodisitas

Pembukuan elemen pengungkapan dan latihan perincian moneter harus diisolasi ke dalam periode pengumuman sehingga pameran elemen dapat diperkirakan dan situasi asetnya tidak benar-benar diselesaikan. Periode prinsip yang digunakan adalah tahun. Namun, periode bulan ke bulan, triwulanan dan setengah tahunan juga disarankan.

6) Konsistensi

Perlakuan pembukuan yang serupa diterapkan pada peristiwa-peristiwa komparatif dari satu periode ke periode lainnya dengan elemen perincian (dalam standar konsistensi). Ini tidak berarti bahwa tidak boleh ada perubahan dimulai dengan satu teknik pembukuan kemudian ke yang berikutnya. Teknik pembukuan yang digunakan dapat diubah tergantung pada prasyarat bahwa strategi baru yang diterapkan dapat memberikan data yang lebih disukai daripada strategi lama. Dampak perubahan penggunaan strategi ini terungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Pengungkapan Penuh

Laporan anggaran memberikan total data yang dibutuhkan oleh klien. Data yang dibutuhkan oleh klien laporan anggaran dapat diatur pada lembar muka ringkasan fiskal atau catatan atas laporan anggaran.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Ikhtisar fiskal menyajikan secara nyata Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Neraca Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berkenaan dengan pertunjukan yang wajar, insting cerdas diperlukan bagi para penyusun laporan anggaran ketika mengelola kerentanan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kerentanan tersebut dirasakan dengan mengungkap temperamen dan derajatnya dengan memanfaatkan naluri yang baik dalam penyusunan laporan fiskal. Perenungan yang baik mengandung komponen kehati-hatian ketika membuat perkiraan dalam keadaan rentan dengan tujuan agar sumber daya atau bayaran tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban tidak diremehkan. Bagaimanapun, penggunaan naluri yang baik tidak memungkinkan, misalnya, pengaturan simpanan yang tertutup, dengan sengaja menetapkan sumber daya atau pembayaran yang terlalu rendah, atau dengan sengaja mencatat kewajiban atau konsumsi yang

terlalu tinggi, sehingga laporan fiskal tidak memihak dan dapat diandalkan.³⁰

4. Laporan Realisasi Anggaran

a. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan pengakuan pengeluaran adalah laporan yang menyajikan jenis pendapatan, distribusinya, dan menggambarkan pemeriksaan antara rencana keuangan dan penugasannya.³¹ LRA dibuat untuk melengkapi data dengan membandingkan pengakuan dan pengeluaran yang telah dilakukan dalam satu periode. Sebagaimana ditunjukkan oleh KSAP PP No. 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan garis besar tentang sumber, penugasan, dan pemanfaatan aset keuangan yang diawasi oleh pemerintah lingkungan, yang menunjukkan korelasi antara rencana pengeluaran dan pengakuannya dalam satu periode yang terperinci.³² Unsur mengumumkan menyajikan pengaturan pembayaran berdasarkan jenis pembayaran LRA dalam laporan pengakuan pengeluaran. Substansi perincian juga menyajikan karakteristik penggunaan menurut jenis konsumsi dalam laporan laporan pengeluaran. Data yang diperkenalkan dalam laporan pengakuan pengeluaran adalah sebagai berikut:³³

1) Akuntansi Pendapatan LRA

Pembayaran LRA dirasakan pada saat uang masuk ke rekening giro umum negara bagian/provinsi. Pembukuan pembayaran LRA dilakukan berdasarkan standar bruto, khususnya dengan mencatat penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah bersih (setelah dibayar dengan biaya). Jika ukuran penurunan pembayaran LRA bersih (biaya) bervariasi terhadap pembayaran yang dimaksud dan tidak dapat

³⁰*Ibid*, h. 12-14

³¹Tulis S. Meliala, *et.al*, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Semesta Media, 2014), h. 25

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 02 PSAP 01, h. 11

³³*Ibid*, Lampiran 1, 03 PSAP 02, h. 5

direncanakan sebelumnya karena siklus belum selesai, maka, pada saat itu aturan kotor dapat dilarang. Pembukuan pendapatan LRA diselenggarakan untuk mengatasi masalah tanggung jawab sesuai dengan pengaturan dan kebutuhan kontrol untuk pemerintah pusat dan lingkungan para eksekutif..³⁴

2) Akuntansi Belanja

Penggunaan dirasakan pada jam penggunaan dalam catatan penyimpanan keseluruhan Negara Bagian/Regional. Secara eksplisit untuk konsumsi melalui pemodal, pengakuan penggunaan terjadi ketika kewajiban penggunaan didukung oleh unit yang memiliki pekerjaan penyimpanan. Penyesuaian penggunaan konsumsi (tanda terima penggunaan) yang terjadi pada jangka waktu berikutnya, revisi penggunaan dicatat dalam LRA berbayar di pos LRA berbayar lainnya. Belanja dipesan oleh:

a) Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi merupakan kumpulan pengeluaran yang bergantung pada jenis pengeluaran untuk melakukan suatu tindakan.

Klasifikasi ekonomi tergantung pada jenis pengeluaran, terdiri dari:³⁵

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberikan keuntungan sesaat, misalnya Belanja Pegawai,

³⁴Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), h. 287

³⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 03 PSAP 02, h. 7

Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Operasional Lainnya.

(2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran konsumsi untuk mengamankan sumber daya tetap dan sumber daya yang berbeda yang memberikan keuntungan untuk lebih dari satu periode pembukuan. Belanja Modal mencakup antara lain penggunaan modal untuk pengadaan tanah, struktur kavling, perangkat keras, dan sumber daya teoritis.

(3) Belanja lain-lain/tak terduga

Belanja lain-lain atau tak terduga merupakan pengeluaran konsumsi untuk latihan-latihan yang sifatnya aneh dan tidak dapat diandalkan untuk diulang, seperti penyelenggaraan peristiwa bencana, bencana sosial, dan penggunaan tak terduga lainnya yang mendasar bagi pelaksanaan kewenangan fokus/pemerintahan teritorial.

b) Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi adalah urutan yang bergantung pada unit otoritatif klien pembelanjaan, pengaturan di dalam pemerintah pusat ini menggabungkan konsumsi per layanan/lembaga negara dan unit otoritatif di bawahnya. Pengelompokan konsumsi berjenjang di pemerintahan terdekat mencakup kegunaan Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tempat kerja pemerintah di tingkat umum/daerah/kota dan organisasi khusus.³⁶

c) Klasifikasi Fungsi

³⁶*Ibid*, h. 8

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi merupakan klasifikasi yang berdasar pada pokok-pokok utama pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Pembukuan konsumsi siap dan memenuhi kebutuhan tanggung jawab sesuai pengaturan, juga dapat diproduksi untuk tujuan kontrol bagi para eksekutif untuk mengukur kecukupan dan kemampuan penggunaan tersebut. Karakterisasi Pengeluaran yang ditunjukkan oleh Fungsi Pemerintah adalah Pelayanan Publik, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata dan Kebudayaan, Agama, Pendidikan dan yang terakhir adalah Perlindungan Sosial.³⁷

3) Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu zat pengumuman dari/ke elemen perincian lainnya, termasuk aset penyesuaian dan aset bagi hasil. Pergerakan terdiri dari pertukaran yang mendekat dan pertukaran aktif. Mendekati Transfer adalah penerimaan uang tunai dari bahan pengungkapan lainnya, misalnya penerimaan aset penyesuaian dari pemerintah pusat dan aset bagi hasil dari pemerintah terdekat. Transfer Aktif adalah konsumsi uang tunai dari elemen pengumuman ke elemen pengungkapan lainnya, misalnya, penggunaan aset penyesuaian oleh pemerintah pusat dan aset bagi hasil oleh pemerintah terdekat.³⁸

Transfer yang masuk maupun transfer yang keluar diakui dengan basis kas, yakni dicatat ketika diberikan atau diperoleh oleh rekening uang umum. Transfer yang masuk dicatat sebesar penerimaan uang yang diperoleh dari bahan perincian lainnya, misalnya penerimaan aset penyesuaian dari pemerintah pusat dan aset bagi hasil dari pemerintah

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid*, h. 8

biasa. Pertukaran aktif dicatat pada ukuran uang tunai yang dikeluarkan dari elemen pengungkapan lainnya, misalnya, aset bagi hasil oleh pemerintah terdekat.

4) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan semua pertukaran moneter administrasi, baik penerimaan dan penggunaan, yang harus dibayar atau akan diperoleh kembali, yang diingat untuk pengeluaran otoritas publik yang pada prinsipnya direncanakan untuk menutupi kekurangan atau berpotensi untuk memanfaatkan kelebihan pengeluaran. Pembukuan uang, antara lain:³⁹

a) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan sebagian besar merupakan penerimaan dari rekening-rekening umum negara/provinsi, termasuk dari penerimaan kredit, transaksi obligasi pemerintah, lanjutan dari privatisasi organisasi Negara/lokal, penerimaan uang muka yang diberikan kepada pihak luar, kesepakatan spekulasi lain yang sangat tahan lama, dan pembayaran dan toko.

b) Akuntansi Pengeluaran Keuangan

Pembiayaan konsumsi seluruhnya digunakan pada rekening-rekening umum Negara/Daerah, termasuk pengaturan kredit luar negeri, penyertaan modal pemerintah, penggantian uang muka dalam jangka waktu tertentu, dan dasar penopang cadangan.

Pengembangan toko terus menambah cadangan simpanan yang bersangkutan. Hasil yang didapat dari pengelolaan simpanan aset di pemerintah daerah adalah tambahan simpanan cadangan. Hasil ini dicatat sebagai pembayaran LRA di rekening pembayaran unik provinsi lainnya.

³⁹*Ibid*, h. 10-11

c) Akuntansi Pembiayaan Bersih

Pembiayaan bersih adalah perbedaan antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi penggunaan pembiayaan untuk jangka waktu tahun keuangan tertentu.tu.

5) Akuntansi Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran Anggaran (SiLpa atau SiKpa)

SiLPA atau SiKPA merupakan perbedaan lebih/kurang antara pengakuan pendapatan dan konsumsi selama satu periode pengumuman. Perbedaan lebih atau kurang antara LRA pengakuan bayar dan Pengeluaran, seperti penerimaan dan konsumsi pembiayaan selama satu periode perincian dicatat dalam pos SiLPA atau SiKPA. Kelebihan atau kekurangan pembiayaan pembelanjaan menjelang akhir jangka waktu pengungkapan dipindahkan ke Laporan Perubahan Neraca Anggaran.⁴⁰

b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran memberikan data tentang pengakuan pembayaran LRA, konsumsi, pergerakan, kelebihan/kekurangan LRA, dan pembiayaan dari elemen pengumuman, yang masing-masing dikontraskan dan rencana pengeluarannya. Data tersebut berharga bagi klien laporan dalam menilai pilihan sehubungan dengan peruntukan aset keuangan, tanggung jawab dan konsistensi rincian substansi untuk rencana pengeluaran dengan:

- 1) Menyediakan data tentang sumber, porsi dan pemanfaatan aset keuangan
- 2) Menyediakan data pengakuan belanja secara keseluruhan yang berguna dalam menilai pelaksanaan pemerintah sejauh kemampuan dan kecukupan penggunaan belanja.

⁴⁰*Ibid.* h. 11

Laporan Realisasi Anggaran memberikan data yang berguna dalam mengantisipasi aset keuangan yang akan diperoleh untuk membiayai pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah sekitarnya dalam jangka waktu mendatang dengan memperkenalkan laporan relatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat memberikan data klien tentang tanda-tanda pengadaan dan pemanfaatan aset keuangan:

- 1) Telah dilakukan secara produktif, memadai, dan finansial;
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pengeluaran (APBN/APBD); dan
- 3) Telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.⁴¹

c. Laporan Realisasi Anggaran menurut perspektif syariah

Al-Qur'an melatih setiap pemeluknya untuk mencatat semua pertukaran ekonomi, seperti firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah (Al-Qur'an 2:282) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

⁴¹Ibid, Lampiran II, 03 PSAP 02, h. 1-2

اللَّهُ وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّىْ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menecatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah

*memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁴²

Ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* Ini adalah nasehat serta tuntunan dari Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, kalau mereka melaksanakan muamalah secara tidak tunai, agar menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut dan lebih menguatkan bagi saksi.⁴³ Muamalah adalah hukum yang mengatur antara dua orang atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dsb.⁴⁴ Dalam laporan realisasi anggaran, pencatatan dan penulisan laporan yang benar sangat penting untuk dilakukan mengingat salah satu sumber pendapatan yang ditulis dalam laporan realisasi anggaran adalah pajak yang berasal dari masyarakat, yang tentunya ini adalah amanah yang harus dilakukan sebaik-baiknya agar uang yang berasal dari masyarakat bisa terealisasi dengan baik dan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti kalimat *"Hendaklah kamu menuliskannya."* ini merupakan perintah dari Allah Swt supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat bukti dan menjaganya dari tindak kecurangan yang bisa saja terjadi.

Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan *"Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada ketidakraguan."* Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian, yaitu untuk menulis kebenaran karena lebih menguatkan kesaksian, jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Ankarleema, 2016), h. 48

⁴³Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, cet 4, 2004), jilid I, h. 561

⁴⁴Dudi Badruzaman, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Moro. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, November 2018, h. 109

ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menuliskannya, maka ia lebih cenderung lupa, sebagaimana yang sering terjadi.⁴⁵ Lalu dalam ayat yang sama juga disebutkan “*Dan bertakwalah kepada Allah.*” Maksudnya hendaklah kamu takut dan senantiasa berada dibawah pengawasan-Nya dan jauhilah semua yang dilarang-Nya⁴⁶, penggalan ayat ini dipertegas lagi dalam surah al-isra (QS. 17:36) yang berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya :

*Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*⁴⁷

Dalam ayat tersebut disebutkan, “*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*” Maksudnya, seorang hamba kelak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendengaran, penglihatan dan hati pada hari kiamat serta apa yang telah dilakukan dengan semua badan tersebut.⁴⁸ Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, penerapan konsep pertanggungjawaban untuk menjalankan amanah kepada pihak-pihak yang terkait wajib untuk dilakukan. Perintah ini bersifat universal yang artinya dalam praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar agar semua pihak merasakan manfaat dari laporan realisasi anggaran yang ditulis.

⁴⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. Abdul Ghoftar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I, cet 4, 2004), jilid I, h. 566-567

⁴⁶*Ibid*, h. 568

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Ankarleema, 2016), h. 285

⁴⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. Abdul Ghoftar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I, cet 4, 2004), jilid 5, h. 165

Dari yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep islam adalah kumpulan dasar-dasar hukum berasal dari sumber-sumber syariah islam untuk dipergunakan sebagai aturan dan pedoman oleh seorang akuntan dalam melakukan pekerjaannya, baik dalam mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan maupun melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa ekonomi.

B. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih (2020)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)	Analisis deskriptif	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan

				PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. ⁴⁹
2	Putri Sundary (2020)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran Pada kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi riau sudah Terealisasi dengan baik dan kanwil perbendaharaan sangat memanfaatkan Anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari Yang dianggarkan dan penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun Sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 tahun 2010. ⁵⁰
3	Paidi (2019)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan	Deskriptif kualitatif	Penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dan telah menyajikan unsur-

⁴⁹Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)", *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2020, Vol. 23, No. 3, h. 247-267

⁵⁰Putri Sundary, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau" (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, 2020)

		Percut Sei Tuan)		unsur laporan realisasi anggaran. ⁵¹
4	Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah Nurfadillah (2019)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Kedua, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien. Ketiga, sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal. ⁵²
5	Nur Aprilia	Analisis laporan	Deskriptik	Hasil penelitian

⁵¹Paidi, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realiasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan) (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019)

⁵²Ruliaty, et. al., "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone" dalam *Jurnal Ekonomi Unismuh*, 2019, Vol 1, No 1, h. 40-66

	(2019)	Realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pada pelabuhan kelas IV Tegal	kuantitatif	menunjukkan bahwa anggaran pendapatan sudah sangat efektif karena memiliki presentase dengan rata-rata 162,53%, namun realisasi belanja KSOP cukup efektif dan kurang efisien karena memiliki presentase rata-rata 89,77%. ⁵³
6	Rusdi (2018)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektifitas pendapatan dari pemerintah Kab. Enrekang T.A 2015-2017 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90%-100% serta Pemerintah kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien, hal ini terlihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yang mampu menghemat anggaran belanja sebesar 26,08%; 15,13%; 41,05% ⁵⁴
7	Rukayah, Nugrahini Kusumawati,	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Badan

⁵³Nur Aprilia, "Analisis laporan Realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pada pelabuhan kelas IV Tegal", (Tugas Akhir, Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, 2019)

⁵⁴Rusdi, "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

	Raden Irna Afriani (2017)	Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang		Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dikatakan berhasil Merealisasikan Pendapatan dengan Anggaran Pendapatannya. namun kurang berhasil dalam Merealisasikan Belanja dengan Anggaran Belanjanya ⁵⁵
8	Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	Analisis deksriptif	Penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada dinas pekerjaan umum kabupaten gresik yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010. ⁵⁶
9	Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw (2015)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan

⁵⁵Rukayah et. al., "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang" dalam *Jurnal Akuntansi*, 2017, Vol 4, No 2, h. 1-11

⁵⁶Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik", *Jurnal Gema Ekonomi*, Desember 2016, h. 155-165

				kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. ⁵⁷
10	Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw (2015)	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	Analisis deskriptif	Penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran yang telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 10,11, dan 14. ⁵⁸

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada riset Albertus Karjono serta Riani Sulistianingsih (2020) memakai pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya serta pendekatan ini pula yang penulis pakai dalam riset ini. Perbandingan riset ini dengan riset albertus karjono terletak pada metode pengumpulan informasinya, periset terdahulu memakai metode kuesioner sebaliknya periset saat ini memakai wawancara.
2. Penelitian Putri Sundary (2020) membahas tentang penerapan PSAP Nomor 02 yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset sundary terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian sundary adalah kantor wilayah direktorat perbendaharaan riau.

⁵⁷Astria Nur Jannah Dien, et. al., “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung” dalam *Jurnal EMBA*, 2015, Vol 3, No 1, h. 534-541

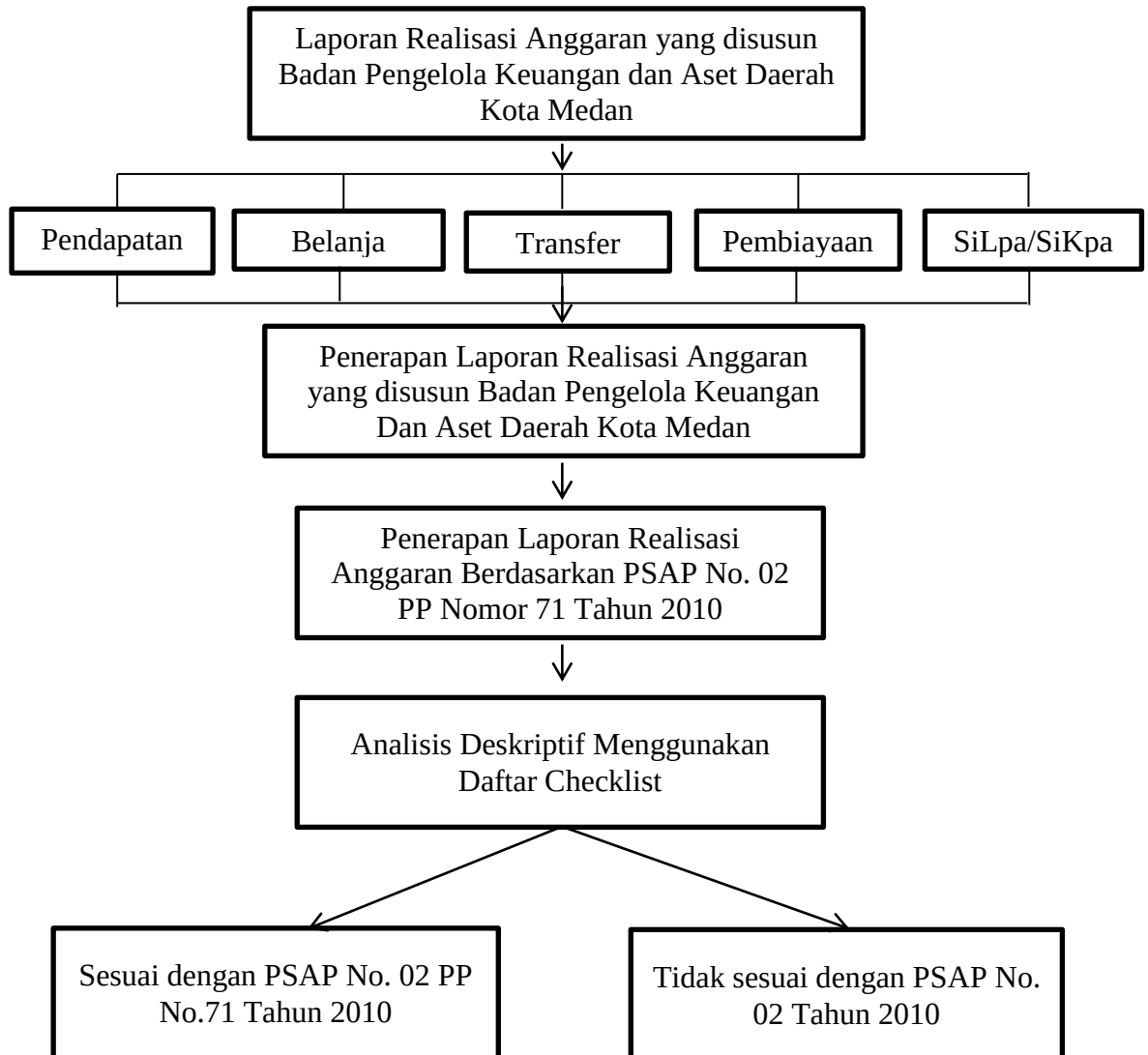
⁵⁸Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw, “Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Maret 2015, Vol. 3, No. 1, h. 418-425

3. Pada riset Paidi (2019) memakai pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya serta pendekatan ini pula yang penulis pakai dalam riset ini. Perbandingan riset ini dengan riset paidi terletak pada objek penelitiannya, dimana objek riset paidi merupakan kantor kepala desa amplas kecamatan percut sei tuan.
4. Penelitian Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah Nurfadillah (2019) membahas tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini serta dengan ruliaty terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah Nurfadillah (2019) adalah di Pemerintah Kabupaten Bone.
5. Penelitian Nur Aprilia (2019) mengulas tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset nur aprilia terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Nur Aprilia (2019) adalah di Kantor kesyahbandaran pelabuhan kelas IV tegal.
6. Penelitian Rusdi (2018) mengulas tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset rusdi terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Rusdi adalah di Pemerintah Kabupaten Enrekang.
7. Riset Rukayah, Nugrahini Kusumawati, Raden Irna Afriani (2017) mangulas tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana perihal ini sama dengan riset ini. Perbandingan riset ini dengan riset rukayah terletak pada objek penelitiannya, dimana objek riset Rukayah, Nugrahini Kusumawati, Raden Irna Afriani(2017) merupakan di Kantor Tubuh Perijinan Terpadu Serta Penanaman Modal Kabupaten Serang.
8. Penelitian Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash (2016) membahas tentang penerapan PSAP Nomor 02 yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset riyanto terletak pada objek penelitiannya,

dimana objek penelitian Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash (2016) adalah Pemerintah kabupaten gresik

9. Penelitian Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw (2015) mengulas tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset astria nur jannah dien terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw (2015) adalah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
10. Penelitian Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw (2015) mengulas tentang Penyajian laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset siti terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw (2015) adalah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tipe riset ini ialah riset kualitatif serta pendekatan riset ini menggunakan tata cara kualitatif deskriptif. Creswell mendefinisikan tata cara kualitatif deskriptif selaku sesuatu pendekatan ataupun penelurusan buat mengeksplorasi serta menguasai sesuatu indikasi sentral. Buat paham indikasi sentral tersebut periset mewawancarai peserta riset ataupun narasumber dengan mengajukan persoalan yang universal serta agak luas. Hasil akhir dari riset kualitatif dituangkan dalam laporan tertulis. Laporan tersebut bertabiat fleksibel sebab tidak terdapat syarat baku tentang struktur serta wujud laporan hasil riset kualitatif.¹

Sebaliknya pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan kualitatif, ialah tipe riset yang tiap temuannya tidak di peroleh lewat prosedur statistik ataupun wujud hitungan yang lain. Riset ini diartikan buat mengenali fenomena tentang apa yang di natural oleh subjek riset, semacam sikap, anggapan, motivasi, aksi serta lain- lainnya yang memakai tampilan berbentuk perkata lisan ataupun tertulis yang di cermati oleh peneliti.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Adapun rincian penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarang: GRASINDO, 2010), h.7

²Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Citapusaka Media, 2014), h. 35

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Penelitian/Riset																
6	Bimbingan Skripsi																

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Tipe informasi pada riset ini merupakan informasi kualitatif. Informasi kualitatif merupakan informasi yang disajikan dalam wujud perkata (tulisan), foto (audio) ataupun video yang mempunyai arti. Data- data tersebut diperoleh dari wawancara, perekaman, pemotretan, pengamatan serta lain sebagainya.³ Kerap diucap tata cara riset naturalistik sebab penelitiannya dicoba dalam keadaan alamiah. Tata cara kualitatif digunakan buat memperoleh informasi yang mendalam ialah informasi yang memiliki arti. Arti merupakan informasi yang sesungguhnya, informasi yang tentu ialah sesuatu nilai balik informasi

³Rumus statistic, *Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, <https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html>, diakses pada 14 juni 2021

yang nampak. Oleh sebab itu, dalam riset kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, namun lebih menekankan pada arti.⁴

2. Sumber Data

Dalam riset ini, sumber informasi yang digunakan terdapat 2 ialah informasi primer serta informasi sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ataupun pihak awal.⁵ Informasi primer ialah sumber informasi riset yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak lewat media perantara). Informasi primer bisa berbentuk opini subjek (orang) secara individual ataupun kelompok, hasil observasi terhadap sesuatu barang (raga), peristiwa ataupun aktivitas serta hasil pengujian.⁶ Informasi primer dalam riset ini di peroleh lewat wawancara yang dicoba secara langsung kepada Staff Bidang Akuntansi serta Pelaporan BPKAD Kota Medan. Wawancara ini dicoba buat memperoleh informasi serta data yang relevan dengan topik riset.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul informasi serta diterbitkan kepada warga pengguna jasa cocok dengan kebutuhan..⁷ Informasi sekunder biasanya berbentuk fakta, catatan ataupun laporan historis yang sudah disusun serta jadi arsip, serta informasi sekunder dalam riset ini ialah Profil BPKAD Kota Medan, Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. Informasi ini digunakan selaku pendukung buat kelengkapan riset buat menyamakan hasil wawancara

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 14

⁵Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 122

⁶Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 146

⁷Muhammad Maskan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018) h.37

dengan laporan yang terbuat Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah(BPKAD) Kota Medan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah informan maupun narasumber yang jadi sumber informasi studi..⁸ Subjek riset ini merupakan Staff Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Medan.

2. Objek Penelitian

Objek riset merupakan topik kasus yang dikaji dalam riset.⁹ Objek riset ini merupakan LRA pemerintah kota medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan pada riset ini merupakan selaku berikut :

1. Wawancara

Tata metode ini yakni tata metode pengumpulan data yang dicoba demi memperoleh informasi secara langsung dengan wawancara kepada narasumber.¹⁰ Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dengan penggunaan yang lebih fleksibel. Pada umumnya wawancara dicoba secara bertatap muka langsung. Namun, ada sebagian wawancara yang dicoba melalui telepon, Mengenai ini digunakan buat menjauhi kelemahan wawancara dengan tatap muka langsung yang disebabkan pandemi covid- 19 maupun letak geografis yang jauh. Karena yang sangat berarti bila melaksanakan wawancara yakni

⁸Sosiologis.com/objek-penelitian, diakses pada 28 Juli 2021

⁹*Ibid.*

¹⁰Arfan Ikhsan, *et.al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan manajemen*, (Bandung, Citapustaka Media, 2014) h. 123

mempererat suatu jalinan persahabatan dengan narasumber.¹¹ Buat mengumpulkan data dan informasi yang valid dan kokoh, langkah mengumpulkan data yang utama yakni pengamat melakukan wawancara secara langsung serta mendalam kepada narasumber yang berkompeten di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan pada bidang akuntansi serta pelaporan. Dan mengumpulkan informasi dari responden yang sehabis itu dijadikan sebagai bahan penataan studi.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yakni sesuatu tata cara pengumpulan data dengan memandang dan menganalisa dokumen laporan realisasi anggaran dan pengumpulan data yang diperoleh dimana penulis turun langsung ke objek studi buat memperoleh data dan realitas yang berkenaan dengan topik yang diteliti dan sehabis itu dicoba pengkajian data- data yang berkaitan dengan kasus yang diamati.

F. Teknik Analisis Data

Tata metode analisis yang digunakan dalam penataan skripsi ini ialah penataan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan buat memberikan gambaran yang mendalam tentang latar belakang berbagai sifat serta berbagai karakteristik yang asli dari subyek yang diteliti. Studi kualitatif ini memiliki arti sebagai suatu proses yang berupaya buat mendapatkan penjelasan yang lebih baik tentang kompleksitas yang terjalin dalam interaksi manusia. Studi kualitatif bertujuan buat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek studi.

Dalam melakukan analisa deskriptif terhadap data studi ini, pengamat melakukan sesi mengumpulkan bermacam informasi dan informasi yang berkaitan dengan LRA, sehabis itu menganalisa data dan informasi tentang LRA dan menganalisis penerapan PSAP Nomor 02 terhadap LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun Badan Pengelola Keuangan serta peninggalan wilayah Kota Medan, selanjutnya merumuskan uraian dari penjelasan yang ada.

¹¹*Ibid.*

Studi ini mendeskripsikan kesesuaian antara Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat BPKAD Kota Medan yang dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada PP Nomor 71 Tahun 2010 melalui tata cara wawancara dengan daftar checklist.

Riset ini mengevaluasi laporan realisasi anggaran Kota Medan dengan analisis komparatif terhadap objek riset dengan konsep pembandingan dalam perihal ini kebijakan akuntansi serta mengombinasikan 2 faktor, YAKNI:

1. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan

Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi serta dari hasil pengumpulan data tersebut didapatkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dan proses penyusunannya.
2. Menganalisa komponen pelaporan yang digunakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
3. Menganalisa anggaran pendapatan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
4. Menganalisa anggaran belanja terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
5. Menganalisa anggaran transfer terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
6. Menganalisa anggaran pembiayaan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02

7. Menganalisa pelaporan LRA yang harus disusun paling sedikit sekali dalam setahun sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
8. Menganalisa klasifikasi pos-pos pendapatan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
9. Menganalisa klasifikasi pos-pos belanja sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
10. Menganalisa klasifikasi pos-pos transfer sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
11. Menganalisa klasifikasi pos surplus atau defisit sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
12. Menganalisa klasifikasi pos-pos penerimaan pembiayaan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
13. Menganalisa klasifikasi pos-pos pengeluaran pembiayaan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
14. Menganalisa klasifikasi pos pembiayaan netto sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
15. Menganalisa klasifikasi pos sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02
16. Menganalisa pelaporan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang harus dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02

Riset ini memakai indikator dengan daftar checklist. Demi memperoleh hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan memakai daftar Checklist, opsi jawaban yang disajikan ialah Ya serta Tidak dimana jawaban Ya bernilai 1 serta Tidak bernilai 0. Buat menghitung persentase jawaban yang diperoleh dengan memakai Rumus Dean J Champion.¹² Di bawah ini adalah kriteria penilaian menurut Dean J. Champion :

¹²Dean J. Champion, *Basic Statistic for Social Research* (London: Chandler Pub. Co., 2009) h. 302

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian

NO	NILAI	KRITERIA
1	0% - 25%	Tidak Baik
2	25% -50%	Kurang Baik
3	50% - 75%	Baik
4	75% - 100%	Sangat Baik

Sumber : Basic Statistic for Social Research, 2009

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan yang satu dari berbagai kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk koherensi dan kemajuan kota Medan, dipercaya bahwa kota Medan akan benar-benar ingin menyelidiki, mengawasi, dan memperluas kemampuan aset yang ada di kota Medan. Dengan terus mengusut, mengawal dan memperluas kemampuan aset yang ada di Kota Medan, sebenarnya ingin membangun retribusi, dalam rangka mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Secara geologis, Kota Medan memiliki posisi penting karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara, sehingga agak dekat dengan masyarakat/negara perkotaan yang lebih berkembang seperti Pulau Penang, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian pula secara demografis, Kota Medan dinilai memiliki porsi tenaga kerja dan produk yang cukup besar dimana pada tahun 2020 telah mencapai 2.524.321 penduduk serta kepadatan penduduk sebesar 9.522,22 jiwa/km². Demikian pula, secara moneter dengan desain moneter yang diliputi oleh daerah tersier dan opsional, Kota Medan dapat dibentuk menjadi pusat pertukaran dan moneter lokal publik.

a. Geografi dan Demografi

Kota Medan ditopang oleh ruang seluas 265,10 km² atau 3,6 persen dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara. Secara resmi, Kota Medan diapit oleh Selat Malaka di utara, dan Kabupaten Deli Serdang di timur, barat, dan selatan. Kota Medan merupakan fokus manajerial Provinsi Sumatera Utara. memiliki posisi esensial yang semakin membumi baik secara lokal maupun secara luas. Posisi ini menjadi modal fundamental dalam kemajuan kota. Kota Medan, mungkin sebagai pusat moneter lokal utama di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga komunitas

kota metropolitan baru, memiliki posisi kunci yang memperkuat baik secara teritorial maupun secara luas. Posisi ini menjadi modal penting dalam kemajuan kota.

Kota Medan sebagai pusat moneter lokal utama di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, kapasitas dan tugas penting sebagai pintu masuk utama bagi pelaksanaan pertukaran teritorial/dunia dan administrasi moneter di Indonesia bagian barat yang ditopang oleh aksesibilitas Pelabuhan Belawan seperti halnya kerangka dan utilitas kota lainnya. Kota Medan secara resmi saat ini terdiri dari 21 sub-lokal dengan 151 sub-wilayah, yang terbagi menjadi 2.001 wilayah. Dari segi regulasi, Kota Medan agak sedikit berbeda dengan masyarakat perkotaan lainnya, namun kondisi keuangan teritorial Kota Medan sangat penting karena terletak di daerah pedalaman dengan basis keuangan yang umumnya besar dan beragam aset tetap, hanya sebagai bantuan pelabuhan.

Dibandingkan dengan daerah perkotaan besar lainnya, Kota Medan memiliki ruang terbatas karena wilayah peraturan yang tipis di tengah. Dengan keterbatasan ruang, batas angkut iklim metropolitan ternyata tidak terlalu ideal, terutama hambatan reguler dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penataan kerangka metropolitan dan perkantoran. Kondisi ini juga membuat kemiringan menjadi kurang disesuaikan dan kurang terkoordinasi dalam penataan ruang metropolitan di bagian utara dan selatan.

b. Lambang Pemerintah Kota Medan



Gambar 4.1
Lambang Pemerintah Kota Medan

Arti dari lambang Pemerintah Kota Medan di atas ialah sebagai berikut:

1. Padi 17 butir menandakan hari ketujuh belas Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 kuntum bunga kapas menandakan bulan kedelapan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Empat penyangga serta lima 5 buah perisai menandakan tahun ke-45 Proklamasi Indonesia.
4. 1 bambu diasah yang terletak di belakang pagar merupakan gambaran perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan 5 bahan pokok terpenting sebelum bambu diasah menyiratkan bahwa Kesejahteraan dan Keadilan Sosial teredar secara merata di hadapan kita.
5. Bintang yang berkilau 5 adalah Bintang Kebangsaan, yang mengandung makna bahwa keberadaan penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia secara keseluruhan akan berkilau dengan indah dan terbebas dari kemelaratan dan keputusasaan.

6. Pancaran bintang 5 berarti 5 bahan pokok terpenting yang dikirim dari Kota Medan dan 5 daerah perisasi berarti Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan

Visi kota medan adalah menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.

Misi Kota Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Kerjasama

Mendorong keamanan, organisasi, investasi dan persekutuan semua mitra kemajuan kota.

- 2) Kreativitas dan Inovasi

Memperluas efektivitas melalui pembebasan dan debirokratisasi serta membangun lingkungan spekulasi yang tidak dapat disangkal menguntungkan, mengingat kemajuan inovasi dan pembangunan provinsi untuk permintaan peningkatan intensitas teritorial dan kapasitas yang dekat.

- 3) Kebhinekaan

Pembinaan karakter wilayah lokal metropolitan bergantung pada moral dan kualitas etika ragam yang ketat di tepi ragam.

- 4) Penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan program peningkatan kecepatan dan perluasan program pengurangan kemiskinan

- 5) Multikulturalisme

Mendorong harmonisasi, kekeluargaan, ketabahan, solidaritas dan kehormatan sosial, dalam pandangan budaya lokal dan kepribadian multikulturalisme di dekatnya.

- 6) Tata ruang kota yang konsisten

Memilah penataan ruang metropolitan yang andal dan ditopang oleh aksesibilitas kerangka dan utilitas metropolitan yang semakin mutakhir dan praktis.

7) Peningkatan kesempatan kerja

Memberdayakan perluasan pembukaan bisnis dan gaji individu melalui perluasan tingkat pelatihan dan kesejahteraan umum secara adil dan wajar.

8) *Smart city*

Mewujudkan Medan sebagai *Smart City*.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

a. Sejarah Singkat BPKAD Kota Medan

Dahulu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih merupakan unit kerja kecil, tepatnya bagian keuangan sekretariat kota Medan dengan tugas utama menangani keuangan pemerintah daerah Medan. Mengingat pada saat itu tugas administrasi moneter pemerintah daerah Medan belum begitu membingungkan, maka pembagian moneter kota Medan terdiri dari satu sekretariat dan 4 bidang, yaitu anggaran, akuntansi, perbendaharaan serta aset. Dengan semakin berkembangnya pergantian peristiwa dan laju perkembangan penduduk Kota Medan, maka pada saat itu melalui Peraturan Daerah Kota Medan no. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan yang terdiri dari 5 ruas dinaikkan menjadi perangkat daerah. kantor administrasi moneter yang tugas utamanya adalah mengawasi dana pemerintah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang layak dijadikan tempat penyelenggaraan administrasi publik dalam kaitannya dengan administrasi besar. Pembinaan dan penyempurnaan penyelenggaraan moneter daerah diarahkan pada penyelenggaraan paguyuban perangkat kewilayahan yang handal dan berkualitas dalam rangka dan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai cara untuk menciptakan dan menggarap administrasi moneter provinsi. Rencana mahir asosiasi perangkat provinsi untuk pengawasan dan

tanggung jawab, kualitas dan pengaturan perincian moneter lokal dan eksekutif. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berharap agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan tepat, cakap dan berhasil dijunjung oleh Lembaga Perangkat Daerah yang layak dan efektif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan yang mengagumkan dapat diakui sesuai dengan kerangka dan metodologi administrasi moneter SOP yang berlaku

b. Struktur Organisasi

Organisasi atau bagian-bagian BPKAD Kota Medan terdiri dari :

1) Kepala Badan

2) Sekretariat

Sekretariat membawahkan beberapa bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Umum
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Penyusunan Program

3) Kepala Bidang Anggaran

Bidang anggaran membawahkan beberapa bagian, yaitu :

- a) Sub Bidang Pendapatan
- b) Sub Bidang Belanja Tidak langsung
- c) Sub Bidang Belanja Langsung

4) Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan membawahkan beberapa bagian, yaitu :

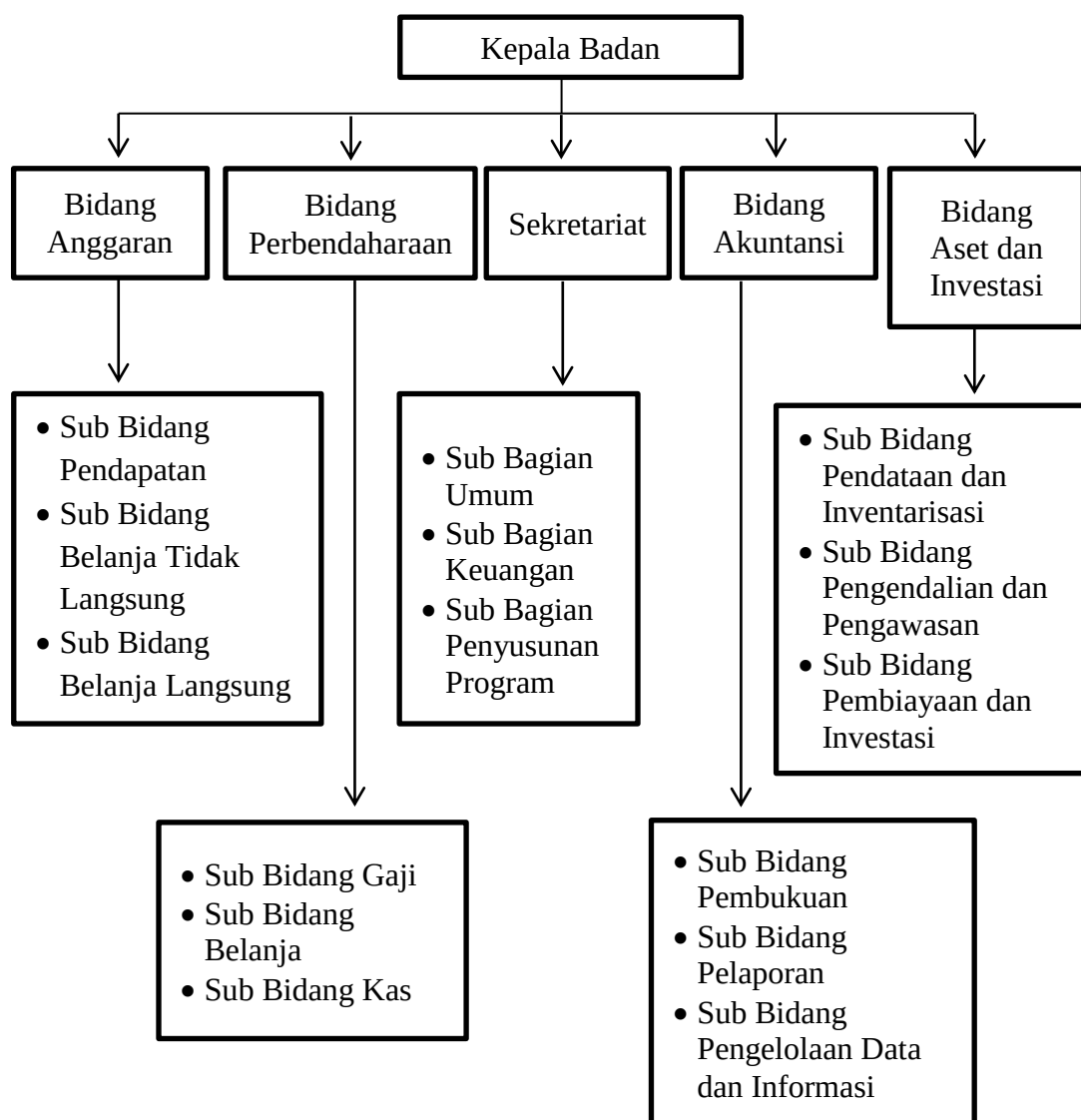
- a) Sub Bidang Gaji
- b) Sub Bidang Belanja
- c) Sub Bidang Kas

5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan beberapa bagian, yaitu :

- a) Sub Bidang Pembukuan
- b) Sub Bidang Pelaporan

- c) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- 6) Kepala Bidang Aset dan Investasi
- Bidang Aset dan Investasi membawahkan beberapa bagian, yaitu :
- Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi
 - Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
 - Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi



Gambar 4.2

Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan terjadi pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dilaksanakan dari tahun 2011-2015. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berharap agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan dapat melaksanakan dengan baik, benar dan memadai yang ditopang oleh Lembaga Perangkat Daerah yang berdaya dan produktif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan yang hebat dapat diakui secara metodologi moneter dan pengurusnya sebagai asas fungsional dan strategi (SOP). Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 adalah **“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang Profesional, Berwawasan Manajemen, Sistematis, Efisien dan Efektif Pengelolaan”**.

Dalam mewujudkan visi ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan menempatkan tujuan utama asosiasi sebagai tugas mendasar yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan hierarkis dalam jangka waktu tertentu.

c. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

BPKAD mempunyai tugas menyelesaikan perincian dan pelaksanaan pendekatan masalah pemerintah provinsi di bidang administrasi moneter wilayah dalam lingkup perencanaan, penyimpanan, pembukuan dan pengumuman. Badan ini juga menjalankan fungsi :

- 1) Perumusan strategi khusus di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
- 2) Penyusunan aturan dan aturan khusus untuk masalah pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
- 3) Memberikan dukungan kepada organisasi pemerintah lingkungan di bidang administrasi moneter.
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan organisasi moneter, pengorganisasian,

pengungkapan dan tanggung jawab administrasi moneter daerah.

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan usaha-usaha di bidang administrasi moneter daerah.

B. Temuan Penelitian

1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Prosedur adalah berbagai kegiatan administrasi yang melibatkan banyak sumber daya manusia untuk mencapai tindakan yang sama dalam melakukan suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin. Lewat prosedur, informasi bisa terkumpul serta di informasikan kepada yang memerlukannya. Penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan diharapkan efektif, efisien dan hemat dengan lewat prosedur yang pas. Perihal ini dikenal sebab laporan realisasi anggaran yang disusun oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Adapun hasil kegiatan wawancara yang penulis lakukan dengan Staff Bidang Akuntansi Subbid Pembukuan yaitu Bapak Darman Silalahi, bahwasanya beliau mengatakan :

“Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan diawali dengan penyusunan LRA di masing-masing SKPD di Kota Medan, setelah itu masing-masing SKPD tersebut mengirimkan LRA-nya kepada BPKAD Kota Medan untuk dihimpun atau digabungkan menjadi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.

Dalam proses penyusunan LRA ini terdapat beberapa kendala baik dari segi penyusunan maupun pencapaian. Kendala dalam proses penyusunan terjadi karena alat kerja yang digunakan oleh pemerintah daerah bernama SIPD, dalam tahun-tahun sebelumnya BPKAD masih menggunakan SIMDA dan itu tidak terdapat kendala, namun setelah menggunakan SIPD kendala-kendala tersebut muncul, hal ini disebabkan karena aplikasi yang berasal dari permendagri tersebut masih baru dan masih dalam tahap uji coba namun sudah wajib digunakan oleh seluruh SKPD di Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan sistem satu data di Indonesia, namun efeknya adalah sering terjadi error yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyusunan LRA Kota Medan. Sedangkan kendala berikutnya adalah pencapaian yang berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena efek

pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda.

Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini dimulai dari bendahara pengeluaran masing-masing SKPD, kasubbag keuangannya, dan kepala SKPD nya. Sedangkan dari BPKAD sendiri yang terlibat adalah bidang akuntansi dan dikarenakan tahun ini sudah menggunakan SIPD maka penyusunan ini juga melibatkan bidang perbendaharaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darman Silalahi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan LRA Kota Medan sudah dilakukan dengan prosedur yang baik, dimulai dengan penyusunan LRA dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota medan kemudian dikumpulkan di BPKAD Kota Medan untuk disusun menjadi LRA Kota Medan. Efek pandemi covid-19 dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat kerja baru yang sering error sehingga menyebabkan beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan dan pencapaian LRA ini, namun hal itu tidak menghalangi proses penyelesaian penyajian LRA Kota Medan ini.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya dimulai bendahara pengeluaran, kasubbag keuangan dan kepala masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota medan. Sedangkan di BPKAD sendiri yang terlibat adalah bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan.

Proses penyusunan LRA kota medan dilaksanakan setiap bulan dan kemudian diakumulasikan pada setiap akhir periode akuntansi, ini dilakukan supaya anggaran yang telah ditetapkan bisa diawasi dengan baik serta pada akhir periode pelaporan SiLPA dan SiKPA dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Berdasarkan proses penyusunan LRA kota medan, dapat diketahui bahwasanya prosedur penyusunan LRA Pemko Medan sudah melibatkan semua pihak yang berkompeten dan terbatas, maka ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Penerapan ini dilakukan dengan membandingkan antara LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PSAP Nomor 02 PP No 71 Tahun 2010 memuat tentang Laporan Realisasi Anggaran. Mengenai kesesuaian penerapan PSAP No 02 PP No 71 Tahun 2010 yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan memakai Rumus Dean J. Champion. Kriteria penilaian menurut Dean J. Champion bisa dilihat pada tabel 3.2.

Berikut adalah hasil yang didapat dari indikator yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan antara PSAP Nomor 02 dengan LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun BPKAD Kota Medan.

Tabel 4.1

Daftar Checklist

No	Uraian Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi anggaran pendapatan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam satu periode	✓	
2	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi anggaran belanja terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode	✓	
3	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi anggaran transfer terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode	✓	
4	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi anggaran surplus/defisit terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran	✓	

	surplus/defisit yang telah ditetapkan dalam satu periode		
5	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi anggaran pembiayaan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu periode	✓	
6	Laporan realisasi anggaran disusun sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	✓	
7	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mengklasifikasikan pos-pos pendapatan	✓	
8	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mengklasifikasikan pos-pos belanja	✓	
9	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mengklasifikasikan pos-pos transfer	✓	
10	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mencatat pos surplus/defisit-LRA	✓	
11	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan	✓	
12	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mengklasifikasikan pos-pos pengeluaran pembiayaan	✓	
13	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mengklasifikasikan pos pembiayaan netto	✓	
14	Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan mencatat pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	✓	
15	Pada akhir periode pelaporan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.	✓	

Cara perhitungan untuk mendapatkan persentase tingkat kesesuaian dengan menggunakan Rumus Dean J. Champion adalah:

$$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\Sigma \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari indikator diatas, maka jawaban “Ya” sebanyak 15 jawaban dan jawaban “Tidak” sebanyak 0 jawaban dari total 15 pertanyaan. Adapun persentase jawaban tersebut yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase jawaban "Ya"} &= \frac{15}{15} \times 100\% \\
 &= 100\% \\
 \text{Persentase jawaban "Tidak"} &= \frac{0}{15} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka persentase yang diperoleh dari jawaban diatas ialah 100% buat kesesuaian pelaksanaan standar akuntansi pemerintah, penulis menarik kesimpulan kalau pelaksanaan PSAP No 02 PP No 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Medan telah dinilai sangat baik. Meskipun penyajian laporan realisasi anggaran masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem yang masih baru dan sering error serta pandemi covid-19 yang masih mewabah, hal itu tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 di lingkungan pemerintah kota medan.

C. Pembahasan Penelitian

Berikut merupakan ulasan dari hasil analisis diatas bersumber pada rumusan masalah :

1. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran diatas maka dapat diketahui penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sudah sangat baik, dimulai dengan menyediakan informasi realisasi pendapatan-LRA yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos pendapatannya, menyediakan informasi belanja yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos belanjanya, menyediakan informasi transfer yang

dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos transfer, menyediakan informasi surplus/defisit-LRA yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos surplus/defisit LRA dan menyediakan informasi pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos pembiayaannya.

Proses penyusunan LRA kota medan dilaksanakan setiap bulan dan kemudian diakumulasikan pada setiap akhir periode akuntansi, hal ini dilakukan agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa dikontrol sebaik mungkin serta pada akhir periode pelaporan SiLPA dan SiKPA dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya dimulai bendahara pengeluaran, kasubbag keuangan dan kepala masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota medan. Sedangkan di BPKAD sendiri yang terlibat adalah bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan.

Meskipun dalam proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem yang sering error dan pandemi covid-19 yang masih mewabah, hal itu tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 di lingkungan pemerintah kota medan.

2. Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun BPKAD Kota Medan dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 tahun 2010

Perolehan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis dengan daftar checklist yang memakai rumus Dean J. Champion memperoleh nilai sebesar 100%. Hal ini berarti laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota medan (lihat lampiran 1) sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010 (lihat lampiran 2). Tingkat kesesuaian ini diperoleh menggunakan 15 indikator penelitian (lihat tabel 4.1), adapun indikator yang pertama yaitu informasi anggaran pendapatan

teralisasi yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam satu periode, hasil riset di BPKAD Kota Medan menampilkan laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan pada indikator pertama telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02.

Selanjutnya pada indikator kedua yaitu informasi anggaran belanja teralisasi yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode, bersumber pada hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa dilihat jika analisis laporan laporan realisasi anggaran Kota Medan pada indikator kedua yakni informasi realisasi belanja yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02.

Pembahasan dilanjutkan dengan indikator ketiga yaitu informasi anggaran transfer teralisasi yang dibandingkan dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode, bersumber pada hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa dilihat jika analisis laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan pada indikator ketiga telah sesuai dengan PSAP No.02 yang adalah standar acuan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Pada indikator keempat mengenai informasi anggaran surplus/defisit teralisasi yang dibandingkan dengan anggaran surplus/defisit yang telah ditetapkan dalam satu periode menampilkan kalau analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan pada indikator keempat telah sesuai dengan PSAP No. 02 yang adalah standar yang berlaku untuk menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Indikator kelima mengulas tentang informasi anggaran pembiayaan teralisasi yang dibandingkan dengan anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu periode. Dari hasil riset di BPKAD Kota Medan menampilkan kalau analisis laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan pada indikator kelima telah sesuai dengan PSAK Nomor 02.

Pada indikator keenam membahas tentang periode pelaporan. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan menampilkan kalau laporan realisasi anggaran disusun setiap bulan untuk kemudian diakumulasikan setiap akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang mengharuskan setiap SKPD menyusun laporan realisasi anggaran paling lambat disusun setelah 6 bulan setelah periode berakhir.

Selanjutnya pada indikator ketujuh yaitu LRA mengklasifikasikan pos-pos pendapatan. Dari hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa dilihat kalau analisis laporan realisasi anggaran Kota Medan pada indikator ketujuh yaitu LRA mengklasifikasikan pos-pos pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA, Pendapatan Transfer – LRA dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02.

Pembahasan dilanjutkan indikator kedelapan yaitu mengklasifikasikan pos-pos belanja, dari hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa ditarik kesimpulan kalau analisis laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan pada indikator kedelapan telah sesuai dengan PSAP No.02 yang adalah standar acuan dalam penyusunan LRA kabupaten/kota dengan menyajikan pos-pos yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Pada indikator kesembilan mengenai LRA mengklasifikasikan pos-pos transfer menunjukkan bahwa analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan pada indikator kesembilan telah sesuai dengan PSAP No. 02 yang merupakan standar yang berlaku untuk menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Indikator kesepuluh mengenai LRA mencatat pos surplus/defisit menunjukkan bahwa analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan pada indikator kesepuluh telah sesuai dengan PSAP No. 02 yang merupakan standar yang berlaku untuk menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Selanjutnya pada indikator kesebelas yaitu LRA mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan. Dari hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa dilihat kalau analisis laporan realisasi anggaran Kota Medan pada indikator kesebelas yaitu LRA mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA dan Koreksi SiLPA telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02. Meskipun dalam PSAP Nomor 02 pos-pos penerimaan pembiayaan juga terdapat pos Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dalam negeri dan penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah serta pemerintah daerah lainnya tapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pemerintah kota medan sendiri tidak melakukan transaksi penerimaan pembiayaan kepada negara, perusahaan maupun pemerintah daerah lainnya dalam 5 tahun terakhir.

Pembahasan dilanjutkan pada indikator kedua belas yaitu LRA mengklasifikasikan pos-pos pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan analisis laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan pada indikator keduabelas dapat diketahui bahwa terdapat pos penerimaan pembiyaan seperti Penyertaan Modal/Investasi. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02. Meskipun dalam PSAP Nomor 02 pos-pos pengeluaran pembiayaan juga terdapat pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman kepada perusahaan negara, daerah atau pemerintah daerah lainnya tapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pemerintah kota medan sendiri tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan kepada negara, daerah atau pemerintahan daerah lainnya dalam 5 tahun terakhir.

Indikator ketiga belas mengenai LRA mencatat pos pembiayaan neto. LRA pemerintah kota medan sudah mencatat pos pembiayaan neto sebagai salah satu pos yang terdapat dalam LRA, hal ini menunjukkan bahwa LRA pemerintah kota medan sudah cocok dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02 yang menjadi acuan dalam pencatatan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia.

Selanjutnya indikator keempat belas mencatat pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Dalam hal ini LRA pemerintah kota medan sudah mencatat pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagai salah satu pos dalam LRA, ini menunjukkan bahwa LRA pemerintah kota medan sudah cocok dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu PSAP Nomor 02.

Yang terakhir adalah indikator kelima belas yang membahas mengenai sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dalam hal ini LRA pemerintah kota medan sudah memindahkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran lebih, ini menunjukkan bahwa pemerintah kota medan sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil riset serta pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta sudah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran, dimulai dengan menyediakan informasi anggaran pendapatan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam satu periode beserta pos-pos pendapatannya, menyediakan informasi anggaran belanja terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode beserta pos-pos belanjanya, menyediakan informasi anggaran transfer terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode beserta pos-pos transfer, menyediakan informasi anggaran surplus/defisit terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran surplus/defisit beserta pos surplus/defisit LRA dan yang terakhir menyediakan informasi anggaran pembiayaan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu periode beserta pos-pos pembiayaannya. Meskipun dalam proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem yang sering error dan pandemi covid-19 yang masih mewabah di Indonesia, hal itu tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 di lingkungan pemerintah kota medan.
2. BPKAD Kota Medan sudah mempraktikkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Hasil perhitungan memakai metode analisis dengan daftar checklist yang memakai rumus Dean J. Champion memperoleh nilai sebesar 100%. Hal ini berarti laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota medan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010. Tingkat kesesuaian ini diperoleh menggunakan 15 indikator penelitian. Ini mengindikasikan bahwa penerapan PSAP Nomor 02 di lingkungan Pemerintah Kota Medan dinilai sangat baik.

B. Saran

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diharapkan terus selaras ketika melakukan penyusunan LRA dan terus mengikuti perubahan-perubahan peraturan penyajian laporan keuangan terkhusus PSAP Nomor 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang bisa saja terjadi kapanpun, ini dilakukan agar laporan yang disusun tidak bias dan berguna bagi siapapun para pengguna laporan.
2. Sebaiknya aparaturnya BPKAD Kota Medan segera melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru diterapkan di seluruh SKPD di Indonesia agar sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan SIPD tidak gagap serta jumlah aparaturnya yang digunakan dalam penyusunan LRA bisa diminimalkan agar aparaturnya yang lain bisa bekerja sesuai dengan tupoksi awalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, cet 4, jilid I, 2004
- *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, cet 4, jilid V, 2004
- Alfiah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Aprilia, Nur. *Analisis laporan Realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pada pelabuhan kelas IV Tegal. Tugas Akhir*. (Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal), 2019
- Asmianti, Siti & Stanley K Walandouw. *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No. 1, 2015
- Astria Nur Jannah Dien, dkk. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*, dalam Jurnal EMBA, Vol 3, No 1, 2015
- Badruzaman. Dudi, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Moro. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2018
- Champion, Dean J. *Basic Statistic for Social Research* London: Chandler Pub. Co, 2009
- Djanegara, Moermahadi S. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik, dan Permasalahan*, Bogor: Kesatuan Press, 2017

- Erlina & Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2015
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. *Teori Konsep Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014
- Hasanah, Nur Amalia dan Achmad Fauzi. *Akuntansi Pemerintahan*, Bogor: In Media, 2017
- Ikhsan, Arfan, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media, 2014
- Indrianto, Nur & Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2014
- Irawan, Mokhamad. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto)*, Jurnal Riset dan Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 2016
- Karjono, Albertus & Riani Sulistianingsih. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 23, No. 3, 2020
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Ankarleema, 2016
- Khusaini, Mohammad. *Penganggaran Sektor Publik*, Malang: UB Press, 2019
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009
- Maskan, Muhammad. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: Polinema Press, 2018
- Meliala, Tulis S, dkk. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Semesta Media, 2014

- Nantono & Namira Ufrida Rahmi. *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Nurlaila. *Pengantar Akuntansi*, Bandung: Citapusaka Media, 2014
- Paidi. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realiasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan)*. Skripsi. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan), 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rukayah, dkk. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*, dalam Jurnal Akuntansi, Vol 4, No 2, 2017
- Ruliaty, dkk. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*, dalam Jurnal Ekonomi Unismuh, Vol 1, No 1, 2019
- Rusdi. “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”. Skripsi. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar), 2018
- Sari, Eka Nurmala, dkk. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2015
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cikarang: GRASINDO, 2010
- Sudaryo, Yoyo, dkk. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2017
- Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Sektor Publik : Teori Konsep Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

- Stefani, Ifa Detri. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan)*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sunday, Putri. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tugas Akhir*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, 2020
- Utomo, Riyanto & Cahaya Elbash. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik*, Jurnal Gema Ekonomi, 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2020

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan - LRA	1.a	4.767.852.448.866,16	4.121.531.212.572,01	86,53	5.518.768.106.206,31
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.a.1)	1.813.909.461.511,16	1.509.429.049.167,01	83,21	1.829.665.882.248,31
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.a.1.a)	1.359.509.068.000,00	1.195.850.162.642,00	87,96	1.472.414.654.505,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.a.1.b)	94.865.269.721,14	89.669.151.517,15	94,52	90.431.692.016,04
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.a.1.c)	15.784.824.073,00	17.831.106.538,27	112,96	14.638.487.560,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	1.a.1.d)	343.750.299.717,02	206.078.628.469,59	59,95	252.181.048.167,27
Pendapatan Transfer - LRA	1.a.2)	2.767.360.207.355,00	2.478.930.403.405,00	89,58	3.401.878.083.958,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.a.2.a)	2.117.360.207.355,00	2.056.223.073.978,00	97,11	2.156.807.334.247,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	1.a.2.a).(1)	204.664.561.000,00	214.341.620.921,00	104,73	135.512.655.615,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.a.2.a).(2)	3.145.826.000,00	2.843.349.483,00	90,38	3.662.066.517,00
Dana Alokasi Umum - LRA	1.a.2.a).(3)	1.560.956.851.000,00	1.493.919.764.000,00	95,71	1.660.238.913.000,00
Dana Alokasi Khusus - RA	1.a.2.a).(4)	348.592.969.355,00	345.118.339.574,00	99,00	357.393.699.115,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		0,00	8.538.533.000,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian - LRA		0,00	8.538.533.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.a.2.b)	650.000.000.000,00	414.168.796.427,00	63,72	1.245.070.749.711,00
Pendapatan Egi Hasil Pajak - LRA	1.a.2.b).(1)	650.000.000.000,00	414.168.796.427,00	63,72	1.245.070.749.711,00
Bantuan Keuangan - LRA	1.a.2.c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	1.a.2.c).(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.a.3)	176.582.780.000,00	133.171.760.000,00	75,42	287.224.140.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	1.a.3).(1)	176.582.780.000,00	133.171.760.000,00	75,42	287.224.140.000,00
Belanja	1.b	5.252.856.581.219,53	3.991.453.349.313,55	75,99	5.059.288.700.981,01
Belanja Operasi	1.b.1)	4.294.875.117.881,45	3.514.889.261.870,27	81,84	4.066.028.241.541,64
Belanja Pegawai	1.b.1.a)	1.981.850.865.489,18	1.640.220.871.179,91	82,76	1.798.919.361.881,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b.1.b)	1.983.356.923.800,27	1.599.401.380.294,36	80,64	2.006.736.639.708,64
Belanja Hibah	1.b.1.c)	319.567.328.592,00	273.555.760.396,00	85,60	254.079.939.952,00
Belanja Bantuan Sosial	1.b.1.d)	10.100.000.000,00	1.711.250.000,00	16,94	6.292.300.000,00

Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun 2020

Uraian	Ref.	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Modal	1.b.2)	447.961.463.338,08	308.278.278.057,33	68,81	992.661.245.694,74
Belanja Modal Tanah	1.b.2).a)	99.913.037.609,00	20.687.014.370,00	20,71	24.746.094.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.b.2).b)	164.181.345.778,00	129.850.666.107,00	79,09	229.035.641.075,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.b.2).c)	78.349.252.882,08	74.701.206.791,00	95,34	240.827.998.427,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.b.2).d)	104.006.730.400,00	81.829.575.489,33	78,68	467.234.704.167,00
Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	1.b.2).e)	1.531.096.669,00	1.209.815.300,00	79,02	30.816.808.025,61
Belanja Tak Terduga	1.b.3)	510.000.000.000,00	168.285.809.385,95	33,00	599.213.744,63
Belanja Tak terduga	1.b.3).a)	510.000.000.000,00	168.285.809.385,95	33,00	599.213.744,63
Transfer	1.c	1.810.493.180,00	1.800.881.180,00	99,47	1.436.985.100,00
Transfer Bantuan Keuangan		1.810.493.180,00	1.800.881.180,00	99,47	1.436.985.100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.810.493.180,00	1.800.881.180,00	99,47	1.436.985.100,00
Surplus/(Defisit)	1.d	(496.814.625.533,37)	128.276.982.078,46	(25,82)	458.042.420.125,30
Pembiayaan	1.e				
Penerimaan Pembiayaan	1.e.1)	506.814.625.533,37	506.651.962.864,37	99,97	68.608.840.240,07
Penggunaan SILPA	1.e.1).a)	506.814.625.533,37	506.651.260.365,37	99,97	67.316.909.942,05
Koreksi SILPA	1.e.1).b)	0,00	702.449,00	0,00	1.291.930.298,02
Pengeluaran Pembiayaan	1.e.2)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto		496.814.625.533,37	496.651.962.864,37	99,97	48.608.840.240,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	624.928.944.942,83	0,00	506.651.260.365,37

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Lampiran 2 :

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)			
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)			
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penerimaan Silpa	xxx	xxx	xx	xxx
73	Penerimaan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xx	xxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)	xxx	xxx	xx	xxx
99	PEMBIAYAAN NETO (84 - 98)	xxx	xxx	xx	xxx
100					
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxx	xxx	xx	xxx

Lampiran 3 :

Daftar Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah seluruh aparaturnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menguasai pencatatan akuntansi pemerintahan?
2. Menurut bapak, apa fungsi laporan realisasi anggaran ini pak?
3. Bagaimana prosedur yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ketika menyusun serta menyajikan LRA pemerintah kota medan?
4. Apakah ada hambatan dalam penyusunan LRA Pemerintah Kota Medan ini?
5. Apakah dengan diterapkannya SIPD membuat penyusunan laporan realisasi anggaran mengalami kendala?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan LRA Pemko Medan?
7. Kapan serta berapa kali Pemerintah Kota Medan melakukan pelaporan LRA?
8. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos pendapatan?
9. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos belanja?
10. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos transfer?
11. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos surplus/defisit?
12. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan?
13. Apakah pada akhir periode jika ada silpa atau sikpa dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih?

14. Untuk pencatatan pendapatan, apakah dilaksanakan berdasarkan asas bruto?
Yaitu dengan mencatat jumlah semua penerimaan dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikonpensasikan dengan pengeluarannya)
15. Jadi menurut bapak, apakah dalam penyusunan LRA Pemerintah Kota Medan sudah efisien, efektif, dan hemat pak?
16. Basis akuntansi apa yang digunakan dalam menyusun LRA Pemerintah Kota Medan pak?
17. Apakah pelaporan LRA Pemerintah Kota Medan sudah dilakukan secara transparan dan informasi tentang LRA mudah untuk diketahui masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan pak?

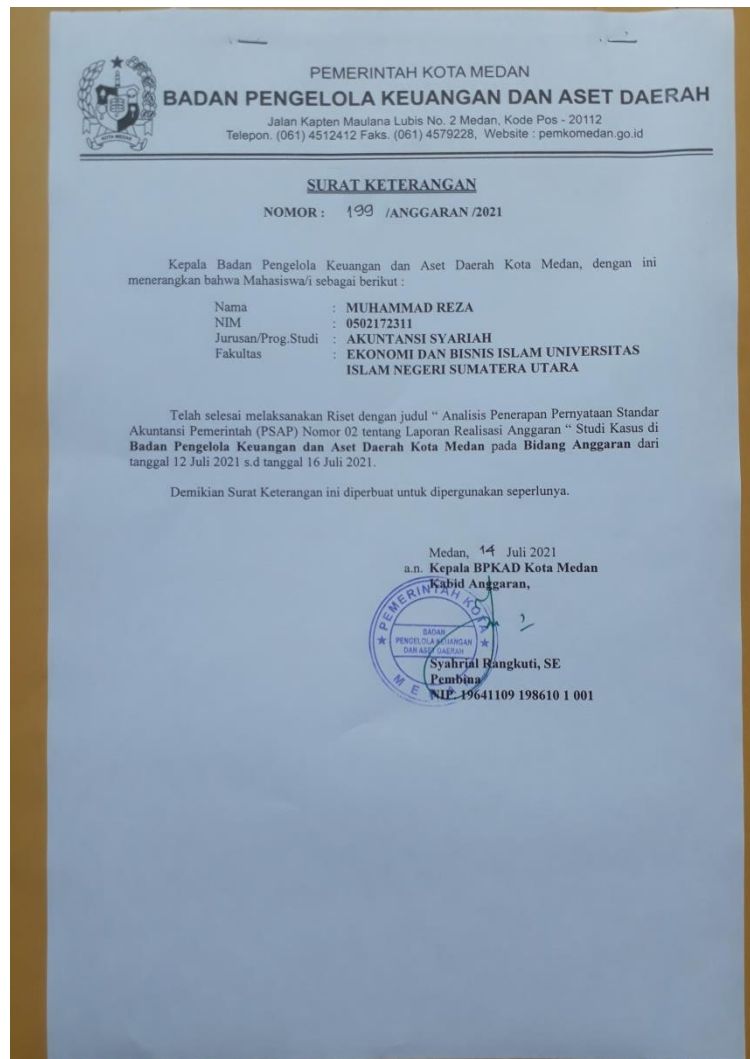
Lampiran 4 :

Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 :

Surat Keterangan Riset



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Reza
2. Nim : 0502172311
3. Tempat/tgl lahir : Stabat/11 November 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Aceh Gg. Aceh V Bandar Setia Deli Serdang

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri Nomor 107415 Batang Kuis Berijazah tahun 2011
2. Tamatan SMP Negeri 1 Batang Kuis Berijazah tahun 2014
3. Tamatan MAN 1 Medan Berijazah tahun 2017
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Departemen Bidang Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FEBI UIN-SU (2019-2020)
2. Ketua Bidang Humas, Advokasi dan Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah FEBI UIN-SU (2019-2020)